

**ANALISIS POLA BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL,
BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL
SEBELUM DAN PASCA PEMILUKADA PADA KEPALA
DAERAH *INCUMBENT***



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Fahreza Riadi Alvian

No. Mahasiswa :14312190

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS POLA BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL,
BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL SEBELUM DAN
PASCA PEMILUKADA PADA KEPALA DAERAH *INCUMBENT***

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Fahreza Riadi Alvian

No. Mahasiswa : 14312190

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.- Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 12 Juli 2018

Penulis



(Fahreza Riadi Alvian)

**ANALISIS POLA BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL,
BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL SEBELUM DAN
PASCA PEMILUKADA PADA KEPALA DAERAH *INCUMBENT***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Fahreza Riadi Alvian

No. Mahasiswa: 14312190

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ...12 Juli 2018

Dosen Pembimbing,



Ace utk diuji

(Dr. Mahmudi, S.E., M.Si, Ak, CA., CMA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS POLA BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BARANG
DAN JASA, DAN BELANJAN MODAL SEBELUM DAN PASCA PEMILUKADA PADA
KEPALA DAERAH INCOMBENT**

Disusun Oleh : **FAHREZA RIADI ALVIAN**

Nomor Mahasiswa : **14312190**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 14 Agustus 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Mahmudi, Dr., SE., M.Si, Ak, CMA.

Penguji : Prapti Antarwiyati, Dra., MS., Ak, CA.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Snyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

*“Did you know? Why people call dreams, dreams? It’s simple, it’s called a dream
because you can’t achieve it”*

(How to open a triangular rice ball Webtoon)

*“Do what you love, love what you do. Pikirkan manfaat untuk orang lain dan jangan
egois”*

(Fitra Eri)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua saya, Bapak Sukandar dan Ibu Siti Rahayuningsih yang selalu mendoakan dan memberikan semangat. Kakak saya Rizky Alif Alvian yang selalu memberikan bantuan, serta teman-teman yang selalu memberikan semangat dan doa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta berkah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi pada penelitian ini. Tidak lupa juga shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pola Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Sebelum dan Pasca Pemilukada Pada Kepala Daerah *Incumbent***” ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (Strata-1) pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti tidak lepas dari bimbingan, petunjuk, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.

2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com(IS)., Ph.D. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si,Ak, CMA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran inspirasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Orang tua tercinta Bapak Sukandar dan Ibu Siti Rahayuningsih yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan, memberi semangat, cinta, dan kasih sayangnya, baik secara moril maupun materil.
7. Rizky Alif Alvian, selaku kakak peneliti, yang telah memberikan banyak bantuan dalam mengerjakan Skripsi ini. Semoga kita bisa terus membanggakan dan berbakti kepada orang tua. Selalu kompak dan saling menjaga dalam situasi apapun.
8. Sahabat SMA peneliti Yuhaya Kan'z S, Hanif Afni, Alfapetra M, serta Sahabat selama kuliah Aprila Ganang dan Amrul Hakim yang selama 4 tahun ini yang selalu membantu dan memberikan motivasi dalam segala hal serta hal baik lainnya yang tak bisa disebutkan secara kata-kata.

9. Hendiwan Yusli, Steffan Rahardian, Puguh Pribadi, Firman Adi, Shika, Mahesa Gaeng, serta teman-teman satu perkuliahan yang tak bisa peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan kerja sama dalam memperjuangkan sarjana serta penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman DotA 2 SMA, Taufan M, M. Dzikron, Baskara A, Romawi P, Hakimul Wafda, yang telah memberikan dan berbagi nasehat dan kisah, canda dan tawa setiap hari dalam bermain DotA 2, serta bertukar pikiran untuk menjadi orang yang lebih berguna.
11. Teman-teman dari guild ZeuS Atlantica yang tidak di sebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan canda tawa selama bermain game Atlantica dan dalam mengerjakan Skripsi.
12. Ghazal Erlangga, M Nudi, Dudie serta teman satu kos Nusa Indah di Jogja yang tak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan bantuan, motivasi, dan kisah yang sangat inspiratif agar menjadi manusia yang lebih baik.
13. Semua partisipan dan pihak-pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan.

Demikian peneliti sampaikan dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan atau berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2018

Penulis,

(Fahreza Riadi A)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar isi	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Pilihan Publik.....	7
2.1.2 Belanja Daerah	10
2.1.3 Pemilukada	16
2.1.4 <i>Incumbent</i> (Petahana).....	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Hipotesis Penelitian	21

2.3.1	Perbandingan Pola Belanja Daerah Tidak Langsung pada <i>Incumbent</i> sebelum dan setelah pemilukada.....	23
2.3.2	Perbandingan Pola Belanja Daerah Langsung pada <i>Incumbent</i> sebelum dan setelah pemilukad.....	25
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	27
3.2	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.3	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	29
3.3.1	Belanja Hibah.....	29
3.3.2	Belanja Bantuan Sosial.....	30
3.3.3	Belanja Barang dan Jasa.....	30
3.3.4	Belanja Modal.....	32
3.4	Metode Analisis Data.....	33
3.4.1	Statistik Diskriptif.....	33
3.4.2	Uji Normalitas.....	33
3.4.3	Uji Wilcoxon Signed Rank Test.....	34
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1	Populasi dan Sampel.....	36
4.2	Statistik Deskriptif.....	39
4.3	Uji Wilcoxon Signed Rank Test.....	41
4.3.1	Belanja Hibah.....	41
4.3.2	Belanja Bantuan Sosial.....	44
4.3.3	Belanja Barang dan Jasa.....	48
4.3.4	Belanja Modal.....	51
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
4.4.1	Belanja Hibah.....	54
4.4.2	Belanja Bantuan Sosial.....	56
4.4.3	Belanja Barang dan Jasa.....	58
4.4.4	Belanja Modal.....	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	63

5.1	Kesimpulan	63
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3	Saran	65
	REFERENSI.....	66
	LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proses Perencanaan dan Penganggaran	10
Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel.....	38
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	39
Tabel 4.3 Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Hibah 2014-2015	41
Tabel 4.4 Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Hibah 2015-2016	42
Tabel 4.5 Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Bantuan Sosial 2014-2015	44
Tabel 4.6 Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Bantuan Sosial 2015-2016	46
Tabel 4.7 Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Barang dan Jasa 2014-2015	48
Tabel 4.8 Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Barang dan Jasa 2015-2016	49
Tabel 4.9 Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Modal 2014-2015.....	51
Tabel 4.10 Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Modal 2015-2016.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Belanja Kepala Daerah <i>Incumbent</i>	69
Lampiran 2: Hasil Normalitas Data.....	96
Lampiran 3: Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test.....	98

ABSTRAK

The purpose of this study is to analyze the pattern of grant expenditure, social assistance expenditure, goods and services expenditure and capital expenditure before and after the election of regional heads incumbent, so it can be known whether the incumbents make use of the budget for the sake of his personal interests or so-called pork barrel politics projects .The population used is 134 incumbents listed on the KPU website (General Election Commission) and specified by viewing the complete report of Budget Realization Report (LRA) at DPJK website (Directorate General of Fiscal Balance) in 2014, 2015, and 2016. By purposive sampling, the samples obtained for this study were 74 for grant expenditure, 68 for social assistance spending, 83 for goods and services spending, and 83 for capital expenditures. The data analysis used is test wilcoxon signed rank test. The result of this study are (1) that the pattern of grant expenditure will rise ahead of the election and will go back down after the election, (2) the pattern of social assistance spending will decrease before the election and back down after the election, (3) the goods and services spending will rise ahead of the election and again after the election, (4) capital expenditures will rise ahead of the election and back up after the election.

Keyword: *election, incumbent, grant expenditure, social assistance expenditure, goods and service expenditure, capital expenditure*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebelum dan pasca pemilukada pada kepala daerah *incumbent*. Sehingga dapat diketahui nantinya apakah *incumbent* melakukan pemanfaatan anggaran demi kepentingan pribadinya atau yang biasa disebut proyek-proyek gentong babi (*pork barrel politics*). Populasi yang digunakan adalah 134 *incumbent* yang terdaftar pada website KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan dispesifikkan dengan cara melihat kelengkapan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di website DPJK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) selama tahun 2014, 2015, dan 2016. Dengan *purposive sampling*, sampel yang diperoleh untuk penelitian ini adalah 74 untuk belanja hibah, 68 untuk belanja bantuan sosial, 83 untuk belanja barang dan jasa, dan 83 untuk belanja modal. Analisis data yang digunakan adalah uji wilcoxon signed rank test. Hasil dari penelitian ini adalah (1) pola belanja hibah akan naik menjelang adanya pemilukada dan akan kembali turun setelah pemilukada, (2) pola belanja bantuan sosial akan turun menjelang pemilukada dan kembali turun setelah pemilukada, (3) belanja barang dan jasa akan naik menjelang pemilukada dan kembali naik setelah pemilukada, (4) belanja modal akan naik menjelang pemilukada dan kembali naik setelah pemilukada.

Kata kunci: pemilukada, *incumbent*, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, belanja modal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu merupakan pesta demokrasi terbesar yang diselenggarakan di Indonesia. Selama Orde Baru pesta demokrasi tersebut hanya digunakan untuk memilih Partai Politik (Parpol), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sementara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sendiri dipilih oleh anggota MPR. Namun berkat adanya Undang Undang nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 (Kurniawan 2004), dan telah disempurnakan kembali dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, sedangkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, Indonesia mengalami proses desentralisasi sehingga antara pusat dan daerah diwajibkan untuk mengatur otonominya sendiri (Budianto dan Alexander 2016). Berdasarkan hal tersebut maka setiap daerah diharuskan memiliki kepala daerah yang mengatur otonominya masing-masing yang dipilih melalui pilukada (pemilihan umum kepala daerah) setiap 5 tahun. Hal tersebut diperjelas didalam Undang Undang 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepala daerah

(eksekutif) dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) (Yuwani and Handayani 2011).

Pemilukada sendiri pertama kali dilakukan pada bulan Juni 2005 (Rumokoy 2016). Sesuai dengan peraturan yang ada, setiap kepala daerah memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan boleh maju kembali menjadi kepala daerah maksimal 2x periode. Namun masalah sebenarnya muncul di saat kepala daerah tersebut maju kembali (*incumbent*/petahana). Sebagai *incumbent* kepala daerah tersebut dapat dengan bebas memainkan anggarannya ataupun membuat kinerja pemerintahannya membaik sehingga mendapatkan dukungan kembali saat mencalonkan diri pada periode yang selanjutnya. Hal tersebut termasuk kedalam jenis patronase. Patronase sendiri dapat diartikan sebagai pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Bentuk dari patronase terdiri dari beberapa macam, seperti pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan & aktivitas, barang-barang kelompok dan yang terakhir adalah proyek-proyek gentong babi (*pork barrel politics*) (Aspinall and Sukmajati 2015). Proyek-Proyek gentong babi juga dapat disebut pemanfaatan anggaran oleh kepala daerah *incumbent*.

Penelitian ini akan berfokus pada salah satu bentuk hubungan patronase yakni *pork barrel politics*. *Pork barrel politics* adalah “bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu”(Aspinall and

Sukmajati 2015,28). Dana publik yang dimaksud di sini dalam bentuk anggaran yang seharusnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena dana tersebut berasal dari masyarakat dan harus dikembalikan ke masyarakat. Dalam hal ini anggaran publik dapat dimengerti sebagai suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan ke dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo 2009).

Sebagai kepala daerah, *incumbent* akan memiliki peluang yang besar untuk memanfaatkan pos-pos belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pribadinya (Ritonga and Alam 2010). Dalam APBD tersebut pos yang dapat digunakan oleh petahana adalah belanja hibah (BH) dan belanja bantuan sosial (BBS) guna memikat hati masyarakat dan mendapatkan dukungan (Ritonga and Alam 2010). Hal ini didukung dalam Pemandagri No. 59 tahun 2007 yang merupakan hasil revisi dari Pemandagri 13 tahun 2006 yang menyatakan bahwa “kedua jenis belanja tersebut merupakan bagian dari komponen belanja tidak langsung (BTL) yang penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan, belanja-belanja ini bersifat tidak mengikat dan tidak secara terus menerus, seperti bantuan kepada organisasi/lembaga/kelompok masyarakat dan kepemudaan, bantuan kepada tokoh masyarakat /perorangan, serta partai politik” (Ritonga and Alam 2010,2-3).

Pada penelitian (Ritonga and Alam 2010) sebelumnya, penelitian tersebut hanya menggunakan belanja hibah dan belanja bantuan sosial sebagai tolak ukur

dengan hasil proporsi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah pilkada *incumbent* lebih besar dari daerah yang *non-incumbent*, selain itu proporsi belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada daerah *incumbent* lebih besar daripada sebelum pilkada. Pada penelitian (Yuwani and Handayani 2011), menggunakan tolak ukur belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah dengan hasil belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah daerah *incumbent* lebih besar pada pemilukada dibanding sebelum pilkada dan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah lebih besar dari daerah *non-incumbent* pada saat pilkada. Pada Penelitian (Amalia dan Pratolo 2015) menggunakan tolak ukur belanja belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dengan hasil belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan *incumbent* lebih besar dibanding sebelum pemilukada dan lebih besar dibanding daerah *non-incumbent*. Pada penelitian (Prabowo 2016) menggunakan tolak ukur belanja hibah yang hasilnya bahwa daerah yang memiliki calon kepala daerah *incumbent* maka belanja hibanya akan semakin tinggi. Sedangkan pada penelitian milik (Suranta dan Pangarso 2017) menggunakan tolak ukur belanja bantuan sosial dan belanja hibah, yang memiliki hasil berbeda di antara lainnya. Hasil tersebut adalah belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak lebih besar dibanding sebelum pemilukada dan belanja hibah dan bantuan sosial dengan daerah *non-incumbent* sama. Penelitian ini akan mengisi celah yang ada dengan

cara memasukan tolak ukur belanja daerah berupa **Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal** sehingga hasil pola belanja daerah yang akan didapatkan nantinya akan menggambarkan hasil yang sebenarnya. Penelitian ini dimaksudkan dengan melihat belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) saat mendekati masa pemilukada dan setelah pemilukada dan apakah kepala daerah *incumbent* tersebut mengoptimalkan seluruh belanja yang ada agar kinerja daerah tersebut terlihat baik sehingga *incumbent* tersebut dapat terpilih kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut serta berbagai hasil dari penelitian sebelumnya maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pola Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Sebelum dan Pasca Pemilukada Pada Kepala Daerah Incumbent**”

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola Belanja Hibah sebelum dan pasca pemilukada?
2. Bagaimanakah pola Belanja Bantuan Sosial sebelum dan pasca pemilukada?
3. Bagaimanakah pola Belanja Barang dan Jasa sebelum dan pasca pemilukada?
4. Bagaimanakah pola Belanja Modal sebelum dan pasca pemilukada?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pola Belanja Hibah sebelum dan pasca pemilukada
2. Mengetahui pola Belanja Bantuan Sosial sebelum dan pasca pemilukada
3. Mengetahui pola Belanja Barang dan Jasa sebelum dan pasca pemilukada
4. Mengetahui pola Belanja Modal sebelum dan pasca pemilukada

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- Memperkaya studi di bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai proyek-proyek gentong babi (*pork barrel politics*)

1.4.2 Manfaat Praktis

- Guna menerapkan transparansi dana publik, sehingga terbentuklah *good governance*
- Sebagai referensi dalam pembentukan aturan agar anggaran tersebut tidak dipermainkan dengan mudah menjelang terjadinya pemilukada

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pilihan Publik

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pilihan Publik. Menurut Caporaso dan Levine (2015,322) “Pilihan Publik didefinisikan sebagai penerapan metode ekonomi terhadap politik tanpa ada upaya untuk menghubungkan metode-metode ini dengan dampak-dampak yang bersifat publik”, yang dimaksud dengan definisi diatas adalah dalam ekonomi biasanya individu yang berperan akan berusaha untuk mengoptimalkan keuntungan ekonominya. Dalam Teori Pilihan Publik nalar ekonomi ini berusaha diterapkan pada ranah politik. Karena itu aktor pada politik akan berupaya mengoptimalkan keuntungan politiknya. Contoh kongkret dari perilaku tersebut adalah pada saat pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan kepentingan politiknya tanpa melihat efeknya terhadap masyarakat.

Caporaso dan Levine (2015,322) berpendapat bahwa “inti dari analisis adalah pelaku-pelaku individu, baik yang bertindak sebagai

anggota partai politik, kelompok kepentingan atau birokrasi, baik ketika individu itu bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat yang diangkat lewat pemilu atau sebagai warga biasa atau sebagai pimpinan dari perusahaan”. Berdasarkan teori tersebut, yang dimaksud sebagai individu dalam penelitian ini adalah kepala daerah, khususnya walikota dan bupati.

Selain itu Caporaso dan Levine (2015,322) berpendapat bahwa “fokus dari pendekatan pilihan publik ini adalah tetap pada individu yang membuat pilihan, yaitu pilihannya dan perilaku maksimalisasi yang dilakukannya. Hasil atau dampak dari keputusan-keputusan pribadi ini bersifat publik, kolektif dan tidak dapat dibagi-bagi”. Berdasarkan kalimat diatas dapat dipahami bahwa individu memiliki kepentingan, berdasarkan paragraf sebelumnya yang dimaksud individu di sini adalah Kepala Daerah Walikota atau Bupati. Demi kepentingannya individu tersebut akan melakukan sesuatu, yaitu mengatur anggaran semaksimal mungkin, untuk kepentingan publik sehingga nantinya individu tersebut akan terpilih kembali dalam pemilukada selanjutnya.

Ada dua aliran dalam Teori Pilihan Publik yaitu, teori yang normatif dan teori yang positif. Pada penelitian ini peneliti akan memilih teori positif sebagai acuan. Ada perbedaan antara teori positif

dan normatif dalam Teori Pilihan Publik. Menurut Caporaso dan Levine (2015,324) Teori Pilihan Publik normatif menganalisis “sifat-sifat dari sistem politik yang dianggap menguntungkan. Misalnya, pengaturan institusional yang bagaimana yang efisien, responsive dan merata?”. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa contoh dari teori pilihan publik normatif dalam penelitian ini adalah apakah kepala daerah dalam mengalokasikan anggaran sudah ideal, efisien dan merata?. Sehingga teori pilihan publik normatif ini melihat apakah yang dilakukan sudah sesuai atau tidak. Sedangkan Teori Pilihan Publik positif menurut Caporaso dan Levine (2015,332) “berupaya untuk merancang penjelasan bagi aturan-aturan dan proses-proses pemilihan yang ada dan menelaah konsekuensinya“. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari pertanyaan yang diajukan didalam teori pilihan publik positif seperti Bagaimana dan kapan atau dalam kondisi bagaimana negara negara bangsa membuat keputusan tentang penyediaan barang-barang publik international? (Caporaso dan Levine,2015). Penggunaan teori pilihan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengapa kepala daerah menggunakan atau mengalokasikan anggarannya semaksimal atau seoptimum mungkin menjelang pilkada.

2.1.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 1 ayat 8, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan dijelaskan lebih detail pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 1 ayat 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan (Rusmana, Setyaningrum, Yuliansyah, & Maryani, 2017) proses perencanaan dan penganggaran meliputi :

Tabel 2.1

Waktu	Kegiatan
Januari	<ul style="list-style-type: none">• Tahun anggaran dimulai• BAPEDDA merumuskan 1 dokumen yang disebut Kerangka Ekonomi Daerah, yaitu proyeksi dari penerimaan dan pengeluaran yang didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya. Kerangka ini memuat daftar aktivitas daerah

	<p>yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Semua kegiatan yang terkait dengan pelayanan publik akan didiskusikan dalam suatu pertemuan yang disebut forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang mana Musrenbang pertama untuk tingkat desa sebaiknya dimulai pada bulan Januari.</p>
Februari	<ul style="list-style-type: none"> • Musrenbang tingkat kecamatan diselenggarakan dibulan Februari • Selanjutnya, dilakukan forum masyawarah tingkat SKPD
Maret	<ul style="list-style-type: none"> • Musrenbang tingkat kabupaten/kota
April-Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Semua aktivitas/program kerja yang berasal dari masing-masing SKPD dikoordinasikan dan dicantumkan dalam bentuk dokumen yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Juni- Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yaitu kebijakan umum tentang APBD

	<p>yang disusun berdasarkan RKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bagi setiap satuan kerja • Penyusunan Rencan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK-SKPD) • Setiap unit kerja mempersiapkan estimasi anggaran yang terkait dengan RK-SKPD dan menyampaikan kepada pemerintah daerah
September	<ul style="list-style-type: none"> • Komplikasi anggaran yang diajukan oleh setiap SKPD
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Finalisasi Anggaran yang dipersiapkan oleh Panitia Anggaran Eksekutif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah • Penyiapan rancangan Perda APBD untuk disetujui DPRD • Pembahasan oleh unsur Legislatif dan Eksekutif
November	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dan pengesahan anggaran oleh DPRD
Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Dalam anggaran tersebut terdapat pendapatan dan belanja. Pada penelitian ini akan berfokus pada belanja yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh *incumbent* demi kepentingan politiknya sehingga *incumbent* tersebut menarik hati masyarakat dan dapat terpilih kembali pada periode berikutnya. Belanja daerah yang akan digunakan pada penelitian ini meliputi :

2.1.2.1 Belanja Hibah

Belanja Hibah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 37 tahun 2010 dapat dijelaskan bahwa dalam menentukan organisasi maupun lembaga yang nantinya akan menerima hibah, agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan adil sesuai dengan kemampuan dari keuangan daerah. Mekanisme penganggaran dan pemberian hibah terhadap instansi vertikal dari pemerintah daerah mengacu pada ketentuan pengelolaan daerah, dan bagi instansi yang menerima hibah tersebut dalam pelaksanaan serta tanggung jawabnya memperhatikan peraturan menteri keuangan terkait hibah daerah. Contoh dari Belanja Hibah adalah pemberian uang dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada masyarakat seperti dalam bidang kesenian maupun adat istiadat.

2.1.2.2 Belanja Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 37 tahun 2010 Belanja Bantuan Sosial dilakukan guna menjalankan fungsi pemerintahan daerah yaitu memelihara kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besarnya sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003. Dalam pemberian Bantuan Sosial ini harus didasarkan kriteria yang jelas, berupa memperhatikan asas keadilan, transparansi dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Contoh dari Belanja Bantuan Sosial adalah belanja penanggulangan kemiskinan, belanja penanggulangan bencana, jaminan sosial dan lain sebagainya.

2.1.2.3 Belanja Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 mengenai klasifikasi anggaran yang dimaksud dengan Belanja Barang dan Jasa adalah “Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau

jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan”. Belanja Barang dan jasa sendiri terdiri dari Belanja Barang yang mencakup belanja operasional maupun non-operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan aset, belanja perjalanan dinas, belanja barang badan layanan umum, belanja barang yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat maupun pemda. Contoh dari belanja barang dan jasa sendiri seperti: belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja keperluan perkantoran, pengadaan bahan makanan dan lain sebagainya.

2.1.2.4 Belanja Modal

Menurut Wertianti dan Dwiranda (2013) Belanja Modal adalah salah satu komponen dari belanja langsung yang digunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan investasi. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2009) yang dikutip dari Wertianti dan Dwiranda (2013) Belanja Modal memiliki definisi sebagai pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset

pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan. Dalam Belanja Modal terdapat beberapa komponen Belanja di dalamnya yaitu: Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan mesin, Belanja Gedung dan bangunan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. Contoh dari Belanja Modal seperti pembelian/ biaya yang digunakan dalam memperbaiki jembatan hingga siap digunakan.

2.1.3 Pemilukada

Menurut Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 definisi dari pemilu adalah “sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Namun dengan adanya Undang Undang nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 (Kurniawan 2004), dan telah disempurnakan kembali dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah,

beserta itu terdapat Undang-Undang No.33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Undang Undang tersebut menjadi dasar bagi proses desentralisasi (Budianto and Alexander 2016) sehingga antara pusat dan daerah diwajibkan untuk mengatur otonominya sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka setiap daerah diharuskan memiliki Kepala Daerah yang mengatur otonominya masing-masing yang dipilih melalui Pemilukada setiap 5 tahun. Hal tersebut diperjelas didalam Undang Undang 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa, Kepala Daerah (eksekutif) dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) (Yuwani and Handayani 2011). Menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 6 seorang calon kepala daerah hanya dapat berkuasa sebanyak 2 kali periode.

2.1.4 *Incumbent (Petahana)*

Incumbent atau yang sering disebut petahana di Indonesia merupakan kepala daerah yang telah memenangi pemilukada periode sebelumnya dan akan maju kembali pada periode selanjutnya. Menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 6 seorang calon kepala daerah hanya dapat berkuasa sebanyak 2 kali periode.

Sehingga kepala daerah yang akan mencalonkan kembali dapat dikatakan sebagai *incumbent*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hingga saat ini, telah terdapat berbagai penelitian yang berupaya menjelaskan belanja daerah menjelang pemilihan kepala daerah. Bab ini berpendapat bahwa penelitian-penelitian tersebut dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok literatur berdasarkan hasil yang mereka dapatkan, yaitu: adanya perbedaan belanja saat adanya pilkada dengan tidak adanya pilkada dan tidak ada perbedaan belanja saat adanya pilkada dengan tidak adanya pilkada.

Dalam golongan literatur pertama, terdapat penelitian-penelitian dari Ritonga dan Alam (2010), Amalia dan Pratolo (2015), prabowo (2016), yuwani dan handayani (2011), Martha (2016). Penelitian pertama dengan pengarang Ritonga dan alam menggunakan teori pilihan publik dengan fokus masalah, apakah incumbent memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja agar dapat terpilih kembali pada periode selanjutnya, dari penelitian tersebut Ritonga dan Alam (2010) beragumen bahwa proporsi belanja hibah dan belanja daerah incumbent lebih besar dibandingkan dengan non incumbent. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *incumbent* menggunakan APBD untuk pencalonannya kembali sebagai kepala daerah.

Penelitian kedua dengan pengarang Amalia dan Pratolo (2015), penelitian tersebut menggunakan beberapa teori, yaitu teori agensi, teori

signaling, teori oportuniste dan teori flypaper effect. Penelitian ini berfokus pada analisis dugaan penggunaan belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan keuangan oleh *incumbent* untuk pemilukada dan efektifitasnya terhadap pendapatan asli daerah. Argumen yang dihasilkan oleh Amalia dan Pratolo dari penelitian tersebut adalah alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* lebih besar dibanding sebelum pemilukada selain itu terdapat pula perbedaan berupa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* lebih besar dibanding dengan daerah non-*incumbent*.

Selanjutnya adalah penelitian Prabowo (2016), penelitian Prabowo menggunakan teori keagenan dan teori pilihan publik dengan fokus untuk meneliti pengaruh faktor politik dan karakteristik pemerintah daerah terhadap alokasi belanja hibah pada pemerintah kota/kabupaten di Indonesia. Dalam penelitian tersebut Prabowo beragumen bahwa faktor politik berpengaruh poitif terhadap alokasi belanja hibah, kondisi tersbut membuktikan bahwa daerah yang memiliki calon kepala daerah (*incumbent*) maka alokasi belanja hibah akan semakin tinggi.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, karya milik Yuwani dan Handayani (2011) menggunakan teori keagenan dan teori pilihan publik yang berfokus pada analisis rasio alokasi belanja antara daerah *incumbent* dan daerah non-*incumbent* sebelum dan pada saat pemilukada (Studi Kasus di

Indonesia). Dalam karya tersebut Yuwani dan Handayani beragumen bahwa terdapat perbedaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan sebelum pemilukada lebih besar dan saat terjadi pemilukada lebih kecil untuk daerah *incumbent*. Selain itu belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan calon *incumbent* lebih besar dibandingkan dengan calon non-*incumbent*.

Ada pula penelitian Martha (2016) yang menggunakan teori pilihan publik dan teori oportunistik yang berfokus pada analisis anggaran belanja daerah sebelum dan pada saat pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada daerah *incumbent* di Indonesia. Martha beragumen bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap proporsi belanja hibah, belanja bantuan keuangan, dan belanja modal sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilukada.

Pada golongan literature kedua ada penelitian milik Suranta dan Pangarso (2017), mereka menggunakan teori politik penganggaran sektor publik dan berfokus pada penganggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah sebelum dan pada saat pemilihan umum kepala daerah tahun 2005. Suranta dan pangarso beragumen bahwa Proporsi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial saat pelaksanaan pemilukada tidak lebih besar dibanding sebelum pelaksanaan pemilukada. Proporsi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial *incumbent* pada saat pelaksanaan Pemilukada tidak lebih besar dari sebelum pemilukada. Dan yang terakhir adalah Proporsi Belanja Hibah dan Belanja

Sosial *incumbent* saat pemilukada sama dengan proporsi daerah non-*incumbent*.

Berdasarkan Penelitian-Penelitian sebelumnya penelitian ini akan lebih berfokus menggunakan Teori Pilihan Publik karena peneliti beranggapan bahwa Teori Pilihan Publik sangat cocok untuk penelitian ini. Selain itu terdapat kelemahan dari Penelitian-Penelitian terdahulu, Penelitian terdahulu hanya menggunakan 2 atau 3 belanja yang dibandingkan Sedangkan pada penelitian ini menggunakan 4 belanja dan yang diinginkan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pola belanja daerah *incumbent* sebelum dan pasca pemilukada.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berkat adanya Undang Undang nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 (Kurniawan 2004), dan telah disempurnakan kembali dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, beserta itu terdapat Undang-Undang No.33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi proses desentralisasi (Budianto and Alexander 2016) sehingga antara pusat dan daerah diwajibkan untuk mengatur otonominya sendiri. Oleh karena itu, maka setiap daerah diharuskan memiliki kepala daerah yang mengatur otonominya masing-masing yang dipilih melalui pemilukada setiap 5 tahun.

Hal tersebut diperjelas didalam Undang Undang 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa, kepala daerah (eksekutif) dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada/) (Yuwani and Handayani 2011).

Setelah berkuasa satu periode, kepala daerah atau yang biasa disebut *incumbent* tersebut dapat mencalonkan kembali karena kepala daerah dapat berkuasa maksimum selama 2 kali periode sesuai dengan Undang Undang nomor 10 pasal 7 tahun 2016. Menurut Dharma dan Martani (2016) “Masyarakat pemilih merespon secara positif hasil kerja kepala daerah pada masa jabatannya, implikasi dari riset ini adalah kepala daerah harus melakukan hal-hal positif bagi masyarakat yang dipimpinnya bila ingin terpilih untuk periode kedua”. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa agar *incumbent* dapat terpilih kembali kinerja *incumbent* tersebut harus baik. Namun berkat adanya kekuasaan yang dimiliki oleh *incumbent* menjelang adanya pemilukada, memungkinkan terjadi kecurangan berupa *incumbent* yang menggunakan anggaran dan mengalokasikannya dengan lebih besar dan lebih memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat sehingga dapat terpilih kembali.

Anggaran yang biasanya digunakan oleh *incumbent* adalah belanja, belanja daerah sendiri biasanya akan cenderung meningkat menjelang pemilukada. Sesuai dengan teori pilihan publik maka eksekutif (kepala

daerah) akan berusaha memaksimalkan anggaran yang ada dalam pemerintahannya, hal ini terjadi karena politisi ingin merebut simpati publik dalam rangka memastikan terpilih kembali. Menurut Saragintan dan Hidayat (2017) alokasi dari belanja hibah ataupun bantuan sosial dapat dikatakan sebagai bentuk dari *pork barrel politic*.

Penelitian ini akan menguji secara empiris bagaimana pola yang akan terjadi pada belanja daerah *incumbent* menjelang terjadinya pemilukada dan setelah *incumbent* tersebut terpilih kembali pada periode kedua.

2.3.1 Perbandingan pola belanja daerah tidak langsung pada *incumbent* sebelum dan setelah pemilukada

Belanja tidak langsung memiliki beberapa komponen dan pada penelitian ini akan digunakan beberapa komponen yang dirasa oleh peneliti akan dimanfaatkan oleh *incumbent* agar dapat terpilih kembali, komponen belanja tersebut adalah Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Berdasarkan teori pilihan publik pada Caporaso dan Levine (2015) individu memiliki kepentingan yang disini disebut pemimpin daerah atau kepala daerah sehingga akan mengoptimalkan keuntungan politiknya sehingga dapat terpilih kembali pada periode kedua. Demi

kepentingan tersebut maka kekuasaan yang digunakan adalah dalam mengatur anggaran yang seoptimal mungkin.

Dalam penelitian Ritonga dan Alam (2010) menyatakan bahwa proporsi belanja daerah serta belanja hibah daerah *incumbent* lebih besar dibandingkan *non-incumbent*. Ada juga penelitian Amalia dan Pratolo (2015) dan Yuwani dan Handayani (2011) yang berpendapat bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan *incumbent* lebih besar dibanding sebelum pemilukada dan dengan *non-incumbent*. Selaras dengan pernyataan sebelumnya Prabowo (2016) juga berpendapat bahwa daerah yang memiliki calon *incumbent* belanja hibahnya akan semakin tinggi. Dari penelitian penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa belanja *incumbent* yang lebih besar disebabkan karena *incumbent* tersebut memiliki kepentingan untuk maju pada periode selanjutnya.

Berdasarkan landasan teori tersebut dan penelitian penelitian terdahulu maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut :

H₁ : Belanja Hibah akan **meningkat** menjelang adanya pemilukada dan akan **kembali turun** setelah *incumbent* terpilih kembali

H₂ : Belanja Bantuan Sosial akan **meningkat** menjelang adanya pemilukada dan akan **kembali turun** setelah *incumbent* terpilih kembali

2.3.2 Perbandingan Pola Belanja Daerah Langsung pada Incumbent sebelum dan setelah pilkada

Belanja Langsung terdiri dari 3 unsur, yaitu Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Pada penelitian ini akan menggunakan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal untuk penelitian. Berdasarkan teori publik maka kepala daerah akan berusaha memaksimalkan politiknya dengan cara mengatur anggaran sebaik mungkin. Sehingga nantinya kepala daerah tersebut dapat terpilih kembali dalam periode kedua.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat penelitian Martha (2016) yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada belanja modal sebelum dan saat pelaksanaan pilkada. Selain itu untuk Belanja Barang dan Jasa masih jarang digunakan sehingga penelitian ini memasukan Belanja Barang dan Jasa, selain itu Belanja Modal juga disertakan dikarenakan didalam Belanja Modal terdapat banyak unsur yang dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah *incumbent* guna memenuhi kepentingannya menjelang pilkada.

Berdasarkan teori Pilihan Publik dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut :

H₃ : Belanja Barang dan Jasa akan **meningkat** menjelang adanya pemilukada dan akan **kembali turun** setelah *incumbent* terpilih kembali

H₄ : Belanja Modal akan **meningkat** menjelang adanya pemilukada dan akan **kembali turun** setelah *incumbent* terpilih kembali

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di Indonesia dan telah melaksanakan pemilu pada tahun 2015. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* sendiri adalah teknik yang dalam pengambilan sampelnya secara sengaja dikarenakan adanya pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga data yang diambil tidak secara acak. Dalam penelitian ini alasan dari pengambilan *purposive sampling* adalah karena data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepala daerah *incumbent* yang terpilih kembali pada periode selanjutnya.

Pada penelitian ini sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 134 kota atau kabupaten yang daerahnya terdapat *incumbent* yang mencalonkan diri pada periode berikutnya. Data *incumbent* tersebut didapatkan dari website resmi KPU (<http://www.kpu.go.id/>) dan nantinya akan ditampilkan pada lampiran yang ada. Sampel penelitian ini adalah Kepala Daerah kabupaten/kota (bupati/walikota) di Indonesia yang nantinya akan dispesifikkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dimana terdapat kepala daerah *incumbent* yang akan mengikuti periode kedua dan terpilih kembali menjadi kepala daerah
2. Kabupaten/Kota yang kepala daerahnya (*incumbent*) terpilih kembali sebagai kepala daerah dan kabupaten/kota tersebut yang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dipublikasikan dalam website DPJK RI selama periode 2014-2016

Kriteria tersebut digunakan karena tidak semua pemerintah daerah menyediakan secara lengkap mengenai informasi keuangannya (LRA-nya). Dengan kriteria penentuan sampel yang telah diterapkan, sampel yang akan digunakan adalah sebanyak-banyaknya pada kabupaten/kota pertahun selama tahun 2014-2016 sehingga pola yang nantinya akan terbentuk menjadi lebih relevan.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data tersebut didapatkan dari Website resmi KPU untuk calon kepala daerah *incumbent* yang mendaftar dan yang menang (pemilukada 2015) untuk periode kedua. Dan untuk data realisasi Anggaran akan diambil dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>). Data yang digunakan dalam laporan ini menggunakan data time series berupa Laporan Realisasi

Anggaran pendapatan dan belanja, dan yang nantinya akan di gunakan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Data-data tersebut nantinya akan dioalah sehingga terlihat pola penggunaan belanja daerah oleh kepala daerah *incumbent* sebelum dan sesudah pemilukada.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Belanja Hibah

Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang ataupun jasa kepada organisasi maupun lembaga lainnya. Untuk menentukan nantinya yang akan menerima hibah, agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan adil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan Belanja Hibah dari kelapa daerah *incumbent* dari tahun anggaran 2014-2016 pada kabupaten ataupun kota yang kepala Daerah *incumbentnya* kembali memenangi pemilukada periode kedua. Pengukuran yang digunakan dalam Belanja hibah adalah perbedaan jumlah yang dikeluarkan untuk belanja hibah pada tahun anggaran 2014-2016 yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran.

$$\Delta \text{Belanja Hibah} = \text{Jumlah Belanja Hibah}_{(t)} - \text{Jumlah Belanja Hibah}_{(t-1)}$$

3.3.2 Belanja Bantuan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 37 tahun 2010 Belanja Bantuan Sosial digunakan Pemerintah Daerah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada kelompok/anggota masyarakat secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besarnya. Penelitian ini menggunakan Belanja Bantuan Sosial dari kelapa daerah *incumbent* dari tahun anggaran 2014-2016 pada kabupaten ataupun kota yang kepala daerah *incumbentnya* kembali memenangi pemilukada periode kedua. Pengukuran yang digunakan dalam Belanja Bantuan Sosial adalah perbedaan jumlah yang dikeluarkan untuk Belanja Bantuan Sosial pada tahun anggaran 2014-2016 yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran.

$$\Delta \text{Belanja Bantuan Sosial} = \text{Jumlah Belanja Bantuan Sosial}_{(t)} - \text{Jumlah Belanja Bantuan Sosial}_{(t-1)}$$

3.3.3 Belanja Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 mengenai klasifikasi anggaran yang dimaksud dengan Belanja Barang dan Jasa adalah “Pengeluaran untuk

menampung pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan”. Belanja Barang dan jasa sendiri terdiri dari Belanja Barang yang mencakup belanja operasional maupun non-operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan aset, belanja perjalanan dinas, belanja barang badan layanan umum, belanja barang yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat maupun pemda.

Penelitian ini menggunakan Belanja Barang dan Jasa dari kelapa daerah *incumbent* dari tahun anggaran 2014-2016 pada Kabupaten ataupun Kota yang *incumbentnya* kembali memenangi pemilukada periode kedua. Pengukuran yang digunakan dalam Belanja Barang dan Jasa adalah perbedaan jumlah yang dikeluarkan untuk Belanja Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2014-2016 yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran.

$$\Delta \text{Belanja Barang dan Jasa} = \text{Jumlah Belanja Barang dan Jasa}_{(t)} - \text{Jumlah Belanja Barang dan Jasa}_{(t-1)}$$

3.3.4 Belanja Modal

Menurut Wertianti dan Dwiranda (2013) Belanja Modal adalah salah satu komponen dari belanja langsung yang digunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan investasi. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2009) yang dikutip dari Wertianti dan Dwiranda (2013) Belanja Modal memiliki definisi sebagai pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan. Dalam Belanja Modal terdapat beberapa komponen Belanja di dalamnya yaitu: Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan mesin, Belanja Gedung dan bangunan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya.

Penelitian ini menggunakan Belanja Modal dari kelapa daerah *incumbent* dari tahun anggaran 2014-2016 pada kabupaten ataupun kota yang *incumbentnya* kembali memenangi pemilukada periode kedua. Pengukuran yang digunakan dalam Belanja Modal adalah perbedaan jumlah yang dikeluarkan untuk Belanja Modal pada tahun anggaran 2014-2016 yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran

$$\Delta \text{Belanja Modal} = \text{Jumlah Belanja Modal}_{(t)} - \text{Jumlah Belanja Modal}_{(t-1)}$$

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015) “Statistik Deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”. Pada Statistik Deskriptif ini yang disajikan oleh peneliti adalah Minimum, Maximum, Mean dan Standart Deviasi.

3.4.2 Uji Normalitas

Menurut Lolombulan (2017) untuk menentukan jenis uji yang akan dilakukan (parametrik atau non parametrik) yang hendak digunakan, maka yang harus dilakukan dahulu adalah menguji kenormalan data. Untuk menguji kenormalan data d dapat menggunakan Uji Kolgomorov-Smirnov diarena $n > 50$, dengah hipotesis :

H_0 = Data d menyebar normal

H_1 = Data d tidak menyebar normal

Jika hasil nilai Sig < 0.05 maka data tidak menyebar secara normal, sedangkan jika Sig > 0.05 maka data bisa dikatakan menyebar atau berdistribusi secara normal.

3.4.3 Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Uji Wilcoxon Signed Rank Test sering juga disebut Uji Wilcoxon Match Pairs Test menurut Sugiyono (2015) merupakan teknik yang digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal (berjenjang). Sedangkan menurut Supangat (2007) Metode Wilcoxon Signed Rank Test adalah metode yang digunakan sebagai alat untuk menguji perbedaan dua median yang diperoleh dari dua himpunan data dengan cara pengambilan data secara bertahap. Dikarenakan data yang akan dianalisis terdistribusi tidak normal maka Uji Wilcoxon Signed Rank Testlah yang paling cocok digunakan untuk penelitian ini.

Uji Wilcoxon Signed Rank Test menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% dan pada penelitian ini menggunakan bantuan dari aplikasi SPSS 23. Rumus untuk Uji Wilcoxon Rank Test menurut Sugiyono (2015) sebagai berikut :

$$Z = \frac{T - \mu_T}{\sigma_T} \quad \text{Dimana } T \text{ jenjang rangking yang kecil}$$

$$\mu_T = \frac{n(n+1)}{4} \quad \text{dan} \quad \sigma_T = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}$$

Sehingga :

$$Z = \frac{T - \mu_T}{\sigma_T} = \frac{T - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}}$$

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji apakah akan menerima atau menolak hipotesis sebagai berikut Wilcoxon Signed Rank Test

- Jika signifikansinya < 0.05 maka H_0 ditolak yang berarti bahwa terdapat perbedaan bermakna.
- Jika signifikansinya > 0.05 maka H_0 diterima yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis pola Belanja Hibah, Belanja bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa , dan Belanja Modal pada kepala daerah *incumbent* sebelum dan pasca pilukada. Data yang telah dikumpulkan berupa data kepala daerah *incumbent* yang kembali memenangi pilukada untuk periode selanjutnya yang terdapat pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>) pada tahun 2014 sampai 2016. Untuk kepentingan pengujian hipotesis maka analisis yang dilakukan adalah analisis non-parametrik Uji Wilcoxon Signed Rank Test Untuk menganalisis hipotesis tersebut maka peneliti menggunakan bantuan program aplikasi SPSS 23.

4.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daerah kabupaten ataupun kota yang berada di Indonesia dan telah melaksanakan pilukada pada tahun 2015 dimana kepala daerahnya (*incumbent*) kembali terpilih untuk periode selanjutnya.

Teknik pemilihan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* sendiri adalah teknik yang dalam pengambilan sampelnya secara sengaja dikarenakan adanya pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga data yang diambil tidak secara acak. Dalam penelitian ini alasan dari pengambilan *purposive sampling* adalah karena data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Incumbent yang terpilih kembali pada periode selanjutnya.

Pada penelitian ini sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 134 kota atau kabupaten yang daerahnya terdapat kepala daerah *incumbent* yang mencalonkan diri pada periode berikutnya. Data kepala daerah *incumbent* tersebut didapatkan dari web resmi KPU dan nantinya akan ditampilkan pada lampiran yang ada. Sampel penelitian ini kepala daerah kabupaten/kota (bupati/walikota) di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dimana terdapat *incumbent* yang akan mengikuti pemilukada periode kedua
2. Kabupaten/Kota yang Incumbent terpilih kembali sebagai kepala daerah dan kabupaten/kota tersebut serta laporan realisasi Anggarannya dipublikasikan dalam website DPJK RI secara lengkap selama periode 2014-2016

Tabel 4.1**PROSEDUR PEMILIHAN SAMPEL**

No.	Kriteria Sampel Penelitian	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
1	Kepala daerah <i>incumbent</i> yang kembali mengikuti pemilu pada periode ke-2	134	134	134	134
2	Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dimana terdapat Incumbent yang akan mengikuti Pemilu pada periode kedua	84	84	84	84
3	Kabupaten/Kota yang Incumbent terpilih kembali sebagai kepala daerah dan kabupaten/kota tersebut serta laporan realisasi APBD-nya dipublikasikan dalam website DPJK RI secara tidak lengkap selama periode 2014-2016	10	16	1	1
Jumlah Sampel Penelitian yang Memenuhi Kriteria		74	68	83	83

Data Sekunder bersumber dari website KPU dan DPJK RI

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 4.2

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BELANJA HIBAH	222	357500000	311497409501	51996911260.40	59257411168.002
BELANJA BANTUAN SOSIAL	204	15000000	102417156288	10207642193.77	14862268957.459
BELANJA BARANG DAN JASA	249	83362988261	2586690389712	314932310519.14	300328687904.295
BELANJA MODAL	249	103134207797	4750206918181	376289091513.91	434547669142.452
Valid N (listwise)	204				

Sumber : Data Sekunder diolah 2018 (SPSS 23)

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- Jumlah Belanja Hibah paling rendah sebesar Rp. 357.500.000 yang dimiliki oleh Kota Tomohon pada tahun 2014, dan Belanja Hibah paling tinggi sebesar Rp. 311.497.409.501 dimiliki oleh Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2014. Sedangkan rata-rata Belanja Hibah oleh *incumbent* menjelang pemilukada dan setelah pemilukada adalah sebesar Rp. 51.996.911.260.40
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial paling rendah sebesar Rp. 15.000.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2016, dan Belanja Bantuan

Sosial paling tinggi dimiliki sebesar Rp. 102.417.156.288 oleh Kab. Kaimana pada tahun 2014. Sedangkan rata-rata belanja hibah oleh *incumbent* menjelang pemilukada dan setelah pemilukada adalah sebesar Rp. 10.207.642.193.77

- c. Jumlah Belanja Barang dan Jasa paling rendah sebesar Rp. 8.336.2988.261 yang dimiliki oleh Kab. Ngada pada tahun 2014, dan Belanja Barang dan Jasa paling tinggi adalah sebesar Rp. 2.586.690.389.712 dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2016. Sedangkan rata-rata Belanja Barang dan Jasa oleh *incumbent* menjelang pemilukada dan setelah pemilukada adalah sebesar Rp 314.932.310.519.14
- d. Jumlah Belanja Modal paling rendah sebesar Rp. 103.134.207.797 yang dimiliki oleh Kabupaten Ngada pada tahun 2014, dan Jumlah Belanja Modal paling tinggi adalah sebesar Rp. 4.750.206.918.181 yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014. Sedangkan rata-rata Jumlah Belanja Modal oleh *incumbent* menjelang pemilukada dan setelah pemilukada adalah sebesar Rp. 376.289.091.513.91

4.3 Uji Wilcoxon Signed Rank Test

4.3.1 Belanja Hibah

Tabel 4.3

Wilcoxon Signed Ranks Test

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Hibah 2015 - Belanja Hibah 2014	8 ^a	36.38	291.00
Negative Ranks			
Positive Ranks	66 ^b	37.64	2484.00
Ties	0 ^c		
Total	74		

a. Belanja Hibah 2015 < Belanja Hibah 2014

b. Belanja Hibah 2015 > Belanja Hibah 2014

c. Belanja Hibah 2015 = Belanja Hibah 2014

Test Statistics^a

	Belanja Hibah 2015 - Belanja Hibah 2014
Z	-5.907 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

rdasarkan tabel 4.3 yang pertama, tabel tersebut menjelaskan perbandingan belanja hibah tahun 2014 dengan belanja hibah 2015, data yang digunakan adalah sebanyak 74 kota atau kabupaten. Dari 74 kota ataupun kabupaten tersebut sebanyak 8 kota ataupun kabupaten tidak mengalami kenaikan belanja hibah dari tahun 2014 ke tahun 2015 (menjelang pemilukada) dan sebanyak 66 kota ataupun kabupaten mengalami kenaikan belanja hibah menjelang pemilukada.

Sedangkan tabel 4.3 yang ke dua menunjukkan hasil dari Uji Wilcoxon. Dari uji tersebut diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0.00 ($p < 0,05$), oleh karena itu dapat diambil kesimpulan “terdapat perbedaan belanja hibah yang bermakna antara sebelum Pemilukada (2014) menjelang Pemilukada (2015).

Tabel 4.4

Wilcoxon Signed Ranks Test

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Hibah 2016 - Belanja Hibah 2015	71 ^a	38.30	2719.00
Negative Ranks			
Positive Ranks	3 ^b	18.67	56.00
Ties	0 ^c		
Total	74		

- a. Belanja Hibah 2016 < Belanja Hibah 2015
- b. Belanja Hibah 2016 > Belanja Hibah 2015
- c. Belanja Hibah 2016 = Belanja Hibah 2015

Test Statistics^a

	Belanja Hibah 2016 - Belanja Hibah 2015
Z	-7.173 ^b
Asymp. Sig. (2- tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Berdasarkan tabel 4.4 yang pertama, tabel tersebut menjelaskan perbandingan belanja hibah tahun 2015 dengan belanja hibah 2016, data yang digunakan adalah sebanyak 74 kota atau kabupaten. Dari 74 kota ataupun kabupaten tersebut sebanyak 71 kota ataupun kabupaten tidak mengalami kenaikan belanja hibah dari tahun 2015 ke tahun 2016 (setelah terjadinya pemilukada) dan sebanyak 3 kota ataupun kabupaten mengalami kenaikan belanja hibah setelah pemilukada terjadi.

Sedangkan tabel 4.4 yang kedua menunjukkan hasil dari Test Statistik. Dari uji tersebut diperoleh nilai signifikasinya sebesar 0.00 ($p < 0,05$), oleh karena itu dapat diambil kesimpulan “terdapat perbedaan belanja hibah yang bermakna antara saat terjadinya pemilukada (2015) dengan setelah terjadinya

pemilukada (2016). Namun berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan tersebut mengarah ke negatif (Belanja Hibah 2016 lebih kecil dari belanja Hibah 2015).

4.3.2 Belanja Bantuan Sosial

Tabel 4.5

Wilcoxon Signed Ranks Test

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Bantuan Sosial 2015 - Belanja Bantuan Sosial 2014	41 ^a	36.07	1479.00
Negative Ranks			
Positive Ranks	27 ^b	32.11	867.00
Ties	0 ^c		
Total	68		

a. Belanja Bantuan Sosial 2015 < Belanja Bantuan Sosial 2014

b. Belanja Bantuan Sosial 2015 > Belanja Bantuan Sosial 2014

c. Belanja Bantuan Sosial 2015 = Belanja Bantuan Sosial 2014

Test Statistics^a

	Belanja Bantuan Sosial 2015 - Belanja Bantuan Sosial 2014
Z	-1.870 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.062

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

rdasarkan tabel 4.5 yang pertama, tabel

tersebut menjelaskan perbandingan belanja bantuan sosial tahun 2014 dengan belanja bantuan sosial tahun 2015, data yang digunakan adalah sebanyak 68 kota atau kabupaten. Dari 68 kota ataupun kabupaten tersebut sebanyak 41 kota ataupun kabupaten tidak mengalami kenaikan belanja bantuan sosial dari tahun 2014 ke tahun 2015 (menjelang terjadinya pemilukada) dan sebanyak 27 kota ataupun kabupaten mengalami kenaikan belanja bantuan sosial menjelang pemilukada terjadi.

Sedangkan tabel 4.5 yang kedua menunjukkan hasil dari test statistik . Dari uji tersebut diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0.062 ($p < 0,05$), oleh karena itu dapat diambil kesimpulan “tidak terdapat perbedaan belanja

bantuan sosial yang bermakna antara sebelum pemilukada (2014) menjelang pemilukada (2015).

Tabel 4.6

Wilcoxon Signed Ranks Test

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Bantuan Sosial 2016 - Belanja Bantuan Sosial 2015	Negative Ranks	44 ^a	1626.00
	Positive Ranks	24 ^b	720.00
	Ties	0 ^c	
	Total	68	

a. Belanja Bantuan Sosial 2016 < Belanja Bantuan Sosial 2015

b. Belanja Bantuan Sosial 2016 > Belanja Bantuan Sosial 2015

c. Belanja Bantuan Sosial 2016 = Belanja Bantuan Sosial 2015

Test Statistics^a

	Belanja Bantuan Sosial 2016 - Belanja Bantuan Sosial 2015
Z	-2.768 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.006

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Berdasarkan tabel 4.6 yang pertama, tabel tersebut menjelaskan perbandingan belanja bantuan sosial tahun 2015 dengan belanja bantuan sosial 2016, data yang digunakan adalah sebanyak 68 kota atau kabupaten. Dari 68 kota ataupun kabupaten tersebut sebanyak 44 kota ataupun kabupaten tidak mengalami kenaikan belanja bantuan sosial dari tahun 2015 ke tahun 2016 (setelah terjadinya pemilukada) dan sebanyak 24 kota ataupun kabupaten mengalami kenaikan belanja bantuan sosial setelah pemilukada terjadi.

Sedangkan tabel 4.6 yang kedua menunjukkan hasil dari tes Statistik. Dari uji tersebut diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0.006 ($p < 0,05$), oleh karena itu dapat diambil kesimpulan “terdapat perbedaan belanja bantuan sosial yang bermakna antara sebelum pemilukada (2015) menjelang pemilukada (2016). Namun berdasarkan tabel 4.6 tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan tersebut mengarah ke negatif (Belanja Bantuan Sosial 2016 lebih kecil dari belanja Bantuan Sosial 2015).

4.3.3 Belanja Barang dan Jasa

Tabel 4.7

Wilcoxon Signed Ranks Test

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Barang dan Jasa 2015 - Belanja Barang dan Jasa 2014	Negative Ranks	11 ^a	304.00
	Positive Ranks	72 ^b	3182.00
	Ties	0 ^c	
	Total	83	

- a. Belanja Barang dan Jasa 2015 < Belanja Barang dan Jasa 2014
- b. Belanja Barang dan Jasa 2015 > Belanja Barang dan Jasa 2014
- c. Belanja Barang dan Jasa 2015 = Belanja Barang dan Jasa 2014

Test Statistics^a

	Belanja Barang dan Jasa 2015 - Belanja Barang dan Jasa 2014
Z	-6.533 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on negative ranks.

Berdasarkan tabel 4.7 yang pertama, tabel tersebut menjelaskan perbandingan belanja barang dan jasa tahun 2014 dengan belanja barang dan jasa 2015, data yang digunakan adalah sebanyak 83 kota atau kabupaten. Dari 83 kota ataupun kabupaten tersebut sebanyak 11 kota ataupun kabupaten tidak mengalami kenaikan belanja barang dan jasa dari tahun 2014 ke tahun 2015 (menjelang terjadinya pemilukada) dan sebanyak 72 kota ataupun kabupaten mengalami kenaikan belanja barang dan jasa menjelang pemilukada terjadi. Sedangkan tabel 4.7 yang kedua menunjukkan hasil dari Uji Statistik. Dari uji tersebut diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0.00 ($p < 0,05$), oleh karena itu dapat diambil kesimpulan “terdapat perbedaan belanja barang dan jasa yang bermakna antara sebelum pemilukada (2014) dengan menjelang pemilukada (2015), perbedaan tersebut mengarah ke positif.

Tabel 4.8

Wilcoxon Signed Ranks Test

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Barang dan Jasa 2016 - Belanja Barang dan Jasa 2015	Negative Ranks	15 ^a	45.67	685.00
	Positive Ranks	68 ^b	41.19	2801.00
	Ties	0 ^c		
	Total	83		

- a. Belanja Barang dan Jasa 2016 < Belanja Barang dan Jasa 2015
- b. Belanja Barang dan Jasa 2016 > Belanja Barang dan Jasa 2015
- c. Belanja Barang dan Jasa 2016 = Belanja Barang dan Jasa 2015

Test Statistics^a

	Belanja Barang dan Jasa 2016 - Belanja Barang dan Jasa 2015
Z	-4.803 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Berdasarkan tabel 4.8 yang pertama, tabel tersebut menjelaskan perbandingan belanja barang dan jasa tahun 2015 dengan belanja barang dan jasa 2016, data yang digunakan adalah sebanyak 83 kota atau kabupaten. Dari 83 kota ataupun kabupaten tersebut sebanyak 15 kota ataupun kabupaten tidak mengalami kenaikan belanja barang dan jasa dari tahun 2015 ke tahun 2016 (setelah terjadinya pemilukada) dan sebanyak 68 kota ataupun kabupaten mengalami kenaikan belanja barang dan jasa setelah pemilukada terjadi.

Sedangkan tabel 4.8 yang ke dua menunjukkan hasil dari Uji Wilcoxon. Dari uji tersebut diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0.00 ($p < 0,05$), oleh karena itu dapat diambil kesimpulan “terdapat perbedaan Belanja Barang dan Jasa yang bermakna antara saat terjadinya pemilukada (2015) dengan saat setelah

pemilukada (2016). Namun berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat diketahui bahwa pebedaan tersebut mengarah ke positif (Belanja Barang dan Jasa 2016 lebih besar dari Belanja Barang dan Jasa 2015).

4.3.4 Belanja Modal

Tabel 4.9

Wilcoxon Signed Ranks Test

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Modal 2015 - Belanja Modal 2014	25 ^a	41.08	1027.00
Negative Ranks			
Positive Ranks	58 ^b	42.40	2459.00
Ties	0 ^c		
Total	83		

a. Belanja Modal 2015 < Belanja Modal 2014

b. Belanja Modal 2015 > Belanja Modal 2014

c. Belanja Modal 2015 = Belanja Modal 2014

Test Statistics^a

	Belanja Modal 2015 - Belanja Modal 2014
Z	-3.251 ^b
Asymp. Sig. (2- tailed)	.001

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Berdasarkan tabel 4.9 yang pertama, tabel tersebut menjelaskan perbandingan belanja modal tahun 2014 dengan belanja modal tahun 2015, data yang digunakan adalah sebanyak 83 kota atau kabupaten. Dari 83 kota ataupun kabupaten tersebut sebanyak 25 kota ataupun kabupaten tidak mengalami kenaikan belanja modal dari tahun 2014 ke tahun 2015 (setelah terjadinya PemiluKada) dan sebanyak 58 kota ataupun kabupaten mengalami kenaikan belanja modal menjelang setelah pemiluKada terjadi.

Sedangkan tabel 4.9 yang kedua menunjukkan hasil dari Uji Wilcoxon. Dari uji tersebut diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0.01 ($p < 0,05$), oleh karena itu dapat diambil kesimpulan “terdapat perbedaan belanja modal yang bermakna antara sebelum pemiluKada (2014) menjelang pemiluKada (2015). Namun berdasarkan tabel 4.9 tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan tersebut mengarah ke positif (Belanja modal 2015 lebih besar dari belanja Modal 2014).

Tabel 4.10

Wilcoxon Signed Ranks Test

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Modal 2016 - Belanja Modal 2015			
Negative Ranks	24 ^a	45.79	1099.00
Positive Ranks	59 ^b	40.46	2387.00
Ties	0 ^c		
Total	83		

a. Belanja Modal 2016 < Belanja Modal 2015

b. Belanja Modal 2016 > Belanja Modal 2015

c. Belanja Modal 2016 = Belanja Modal 2015

Test Statistics^a

	Belanja Modal 2016 - Belanja Modal 2015
Z	-2.924 ^b
Asymp. Sig. (2- tailed)	.003

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Berdasarkan tabel 4.10 yang pertama, tabel tersebut menjelaskan perbandingan belanja modal tahun 2015 dengan belanja modal tahun 2016, data yang digunakan adalah sebanyak 83 kota atau kabupaten. Dari 83 kota ataupun kabupaten tersebut sebanyak 24 kota ataupun kabupaten tidak mengalami kenaikan belanja modal dari tahun 2015 ke tahun 2016 (setelah terjadinya pemilukada) dan sebanyak 59 kota ataupun kabupaten mengalami kenaikan belanja modal menjelang setelah pemilukada terjadi.

Sedangkan tabel 4.10 yang kedua menunjukkan hasil dari Uji Wilcoxon. Dari uji tersebut diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0.03 ($p < 0,05$), oleh karena itu dapat diambil kesimpulan “terdapat perbedaan belanja modal yang bermakna antara saat terjadinya pemilukada dengan setelah terjadinya pemilukada. Namun berdasarkan tabel 4.10 tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan tersebut mengarah ke positif (Belanja Modal 2016 lebih besar dari Belanja Modal 2015).

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Belanja Hibah

Dalam penelitian belanja hibah yang digunakan merupakan jumlah belanja hibah pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Belanja hibah tersebut dibandingkan antara menjelang pemilukada dan setelah pemilukada. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa **belanja hibah *incumbent* akan naik menjelang pemilukada dan**

akan menurun kembali setelah pemilukada hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji Wilcoxon Belanja Hibah tahun 2014 dengan 2015 yang nilai signifikasinya 0.000 dan Belanja Hibah tahun 2015 dengan 2016 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000. Hal ini berarti dengan adanya pemilukada maka Belanja Hibah tersebut akan naik dan setelah adanya pemilukada Belanja Hibah tersebut akan turun kembali. Sehingga Hipotesis Belanja Hibah akan naik menjelang pemilukada dan akan kembali turun setelah pemilukada diterima.

Penggunaan anggaran seperti Belanja Hibah oleh *incumbent* yang akan naik menjelang pemilukada dan akan kembali turun setelah adanya pemilukada sesuai dengan teori Pilihan Publik. Karena dalam Teori Pilihan publik dijelaskan bahwa individu yang membuat pilihan, yaitu pilihannya dan perilaku maksimalisasi yang dilakukannya. Dalam teori tersebut yang dimaksimalisasi berupa Anggaran. Sehingga disaat kepada daerah Incumbent akan menghadapi Pemilukada dia akan memaksimalkan anggaran (proyek-proyek gentong babi) yang ada sehingga terlihat baik dan terpilih kembali pada periode selanjutnya, namun setelah kepentingannya didapatkan Anggaran tersebut akan kembali turun.

Hal tersebut selaras dengan penelitian Ritonga dan Alam (2010), Amalia dan Pratolo (2015), prabowo (2016), Martha (2016), serta Yuwani dan Handayani (2011) yang menyatakan bahwa belanja hibah incumbent lebih besar dibanding sebelum pemilukada selain itu terdapat pula perbedaan berupa alokasi belanja hibah daerah *incumbent* lebih besar dibanding dengan daerah non-*incumbent*, sedangkan menurut Suranta dan Pangarso (2017) berargument bahwa Proporsi Belanja Hibah saat pelaksanaan pemilukada tidak lebih besar dibanding sebelum pelaksanaan Pemilukada.

4.4.2 Belanja Bantuan Sosial

Dalam penelitian belanja bantuan sosial yang digunakan merupakan jumlah belanja bantuan sosial pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Belanja bantuan sosial tersebut dibandingkan antara menjelang pemilukada dan setelah pemilukada. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa **belanja bantuan sosial *incumbent* turun menjelang pemilukada dan akan menurun kembali setelah pemilukada** hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji Wilcoxon Belanja bantuan sosial tahun 2014 dengan 2015 yang nilai signifikasinya 0.062 dan Belanja bantuan sosial tahun 2015 dengan 2016 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.006. Hal ini

berarti dengan adanya pemilukada maka Belanja bantuan sosial tersebut tidak memiliki dampak atau menolak hipotesis yang ada dan setelah adanya pemilukada Belanja bantuan sosial tersebut akan turun kembali sesuai dengan hipotesis. Sehingga Hipotesis Belanja Bantuan Sosial akan naik menjelang pemilukada dan turun setelah pemilukada ditolak

Penggunaan anggaran seperti Belanja bantuan sosial oleh *incumbent* yang akan turun menjelang pemilukada dan akan kembali turun setelah adanya Pemilukada tidak sesuai dengan teori Pilihan Publik. Karena dalam Teori Pilihan publik dijelaskan bahwa individu yang membuat pilihan, yaitu pilihannya dan perilaku maksimalisasi yang dilakukannya. Dalam teori tersebut yang dimaksimalisasi berupa Anggaran. Sehingga disaat kepada daerah Incumbent akan menghadapi Pemilukada dia akan memaksimalkan anggaran yang ada sehingga terlihat baik dan terpilih kembali pada periode selanjutnya, namun setelah kepentingannya didapatkan anggaran tersebut akan kembali turun. Belanja Bantuan Sosial tersebut tidak mengalami kenaikan dapat dikarenakan beberapa faktor namun yang mungkin terjadi adalah adanya janji oleh *incumbent* setelah pemilukada untuk memberikan bantuan, ataupun bisa jadi kepala daerah tersebut tidak menggunakan pos belanja bantuan sosial untuk kepentingan

pribadinya menjelang pemilukada. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk fenomena ini.

Hal tersebut tidak senada dengan penelitian Yunawani dan Handayani (2011) serta Amalia dan Pratolo (2015) yang berargumen bahwa Belanja bantuan Sosial daerah *incumbent* akan lebih besar dibandingkan sebelum pemilukada.

4.4.3 Belanja Barang dan Jasa

Dalam penelitian ini Belanja Barang dan Jasa yang digunakan merupakan jumlah Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Belanja Belanja Barang dan Jasa tersebut dibandingkan antara menjelang pemilukada dan setelah pemilukada. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa **Belanja Barang dan Jasa *incumbent* akan naik menjelang pemilukada dan kembali naik setelah pemilukada** hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji Wilcoxon Belanja Barang dan Jasa tahun 2014 dengan 2015 yang nilai signifikasinya 0.000 dan Belanja Barang dan Jasa tahun 2015 dengan 2016 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000. Hasil 2 Uji Statististik tersebut menunjukkan signifikansi yang kurang dari 0.005 jadi dapat dikatakan terdapat perbedaan Belanja Barang dan Jasa yang bermakna menjelang adanya pemilukada dan setelah adanya pemilukada, namun Belanja Barang dan Jasa setelah

pemilukada tersebut lebih tinggi dari menjelang Pemilukada. Hal tersebut dapat mengindikasikan beberapa faktor, namun yang paling besar adalah pemanfaatan anggaran atau biasa disebut proyek-proyek gentong babi guna memenuhi janji dari *incumbent* kepada masyarakat yang dijanjikan saat pemilukada dan akan akan dipenuhi setelah terjadinya pemilukada. Ataupun saat ini ada penilaian kerja kepala daerah seperti 100 hari kerja, kemungkinan pos ini juga dapat digunakan sehingga saat penilaian 100 hari kerja sudah terlihat apa yang telah dilakukan oleh kepala daerah tersebut.

Penggunaan anggaran seperti Belanja Barang dan Jasa oleh *incumbent* yang akan naik menjelang pemilukada dan kembali naik setelah adanya Pemilukada sesuai dengan teori Pilihan Publik, walaupun tidak sesuai dengan hipotesis yang ada. Karena dalam Teori Pilihan publik dijelaskan bahwa individu yang membuat pilihan, yaitu pilihannya dan perilaku maksimalisasi yang dilakukannya. Dalam teori tersebut yang dimaksimalisasi berupa anggaran. Jika sesuai dengan hipotesis disaat kepada daerah *incumbent* akan menghadapi pemilukada dia akan memaksimalkan Anggaran yang ada sehingga terlihat baik dan terpilih kembali pada periode selanjutnya, namun setelah kepentingannya didapatkan anggaran tersebut akan kembali turun, sehingga seharusnya anggaran tersebut akan turun setelah

pemilukada namun dalam belanja barang dan jasa mengapa selaras dengan Teori Pilihan Publik karena kepala daerah tersebut tetap memaksimalkan dan menggunakan anggarannya demi kepentingan janji yang telah dia buat atau agar terlihat baik di masyarakat.

4.4.4 Belanja Modal

Dalam penelitian Belanja Modal yang digunakan merupakan jumlah Belanja Modal pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Belanja Modal tersebut dibandingkan antara menjelang Pemilukada dan setelah Pemilukada. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa **Belanja Modal *incumbent* akan naik menjelang pemilukada dan kembali naik setelah adanya pemilukada** hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji Wilcoxon Belanja Modal tahun 2014 dengan 2015 yang nilai signifikasinya 0.001 dan Belanja Modal tahun 2015 dengan 2016 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.003. Dari 2 hasil Uji Statististik tersebut menunjukkan signifikansi yang kurang dari 0.05 jadi dapat dikatakan terdapat perbedaan Belanja Modal yang bermakna menjelang adanya pemilukada dan setelah adanya pemilukada, namun Belanja Modal setelah pemilukada tersebut lebih tinggi dari Belanja Modal menjelang pemilukada. Hal ini berarti dengan adanya pemilukada maka Belanja Modal tersebut akan naik dan setelah adanya pemilukada Belanja Modal tersebut kembali naik.

Sehingga Hipotesis Belanja Modal akan naik menjelang pemilukada dan akan kembali turun setelah pemilukada ditolak.

Penggunaan anggaran seperti Belanja Modal oleh *incumbent* yang akan naik menjelang pemilukada dan akan kembali turun setelah adanya pemilukada sesuai dengan teori Pilihan Publik. Karena dalam Teori Pilihan publik dijelaskan bahwa individu yang membuat pilihan, yaitu pilihannya dan perilaku maksimalisasi yang dilakukannya. Dalam teori tersebut yang dimaksimalisasi berupa anggaran. Sesuai dengan hipotesis yang ada disaat kepada daerah *incumbent* akan menghadapi pemilukada dia akan memaksimalkan anggaran yang ada sehingga terlihat baik dan terpilih kembali pada periode selanjutnya, namun setelah kepentingannya didapatkan Anggaran tersebut akan kembali turun. Namun dalam Belanja Modal ini menjelang Pilkada Belanja Modal naik yang dapat mengindikasikan beberapa hal seperti penilaian 100 hari kerja dimana kepala daerah menggunakan pos belanja modal seperti belanja irigasi dan jaringan, belanja peralatan dan mesin yang dapat langsung terlihat untuk penilaian kinerjanya ataupun janji yang dibuat oleh kepala daerah pada masyarakat jika terpilih kembali (proyek-proyek gentong babi), sehingga sesuai dengan Teori Pilihan Publik yang memaksimalisasi anggaran yang ada demi kepentingan pribadinya.

Hal tersebut selaras dengan karya Martha (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal incumbent lebih besar dibanding sebelum pemilukada dan pada saat pemilukada .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal kepala daerah *incumbent* akan naik menjelang pemilu dan akan kembali turun setelah pemilu. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pola Belanja Hibah naik menjelang adanya pemilu dan setelah pemilu turun kembali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepala daerah *incumbent* tersebut memanfaatkan anggaran atau biasa disebut proyek-proyek gentong babi (*pork barrel politics*) berupa memaksimalkan belanja hibah sehingga dapat terpilih kembali.
2. Pola Belanja Bantuan Sosial turun menjelang adanya pemilu dan setelah pemilu kembali turun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepala daerah *incumbent* tidak menggunakan pos belanja bantuan sosial demi kepentingan pribadinya menjelang pemilu.
3. Pola Belanja Barang dan Jasa naik menjelang pemilu dan kembali naik setelah pemilu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepala daerah *incumbent* memanfaatkan anggarannya atau

yang biasa disebut proyek-proyek gentong babi (*pork barrels politics*) demi terpilih kembali di pemilukada. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor namun yang paling besar adalah janji yang dibuat pada masyarakat saat pemilukada, ataupun demi kinerjanya terlihat baik dikarenakan saat ini ada penilaian 100 hari kerja sehingga pos belanja barang dan jasa naik setelah pemilukada

4. Pola Belanja Modal naik menjelang pemilukada dan kembali naik setelah pemilukada. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepala daerah *incumbent* memanfaatkan anggarannya atau yang biasa disebut proyek-proyek gentong babi (*pork barrels politics*) demi terpilih kembali di pemilukada. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor namun yang paling besar adalah janji yang dibuat pada masyarakat saat pemilukada, ataupun demi kinerjanya terlihat baik dikarenakan saat ini ada penilaian 100 hari kerja dikarenakan pos belanja modal seperti belanja irigasi dan jaringan dapat terlihat cepat untuk penilaian kinerja kepala daerah, sehingga pos belanja modal naik setelah pemilukada

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa keterbatasan berupa :

1. Data yang berasal dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>) ada beberapa dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak lengkap sehingga beberapa data Kepala Daerah *Incumbent* yang memenangi periode selanjutnya terpaksa dihilangkan dari penelitian ini.

5.3 Saran

1. Penelitian Selanjutnya lebih merinci dari belanja tersebut sehingga dapat mengetahui apakah Kepala Daerah *Incumbent* menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadinya, contoh Belanja Modal dapat dibagi ke beberapa belanja lagi seperti Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan, sehingga terlihat jelas Belanja manakah yang digunakan Kepala Daerah *Incumbent*.
2. Penelitian Selanjutnya menambah periode dari pengamatan. Dikarenakan hasil Laporan Realisasi Anggaran 2017 belum tersedia, maka tidak dimasukkan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan periode selanjutnya ataupun sebelumnya sehingga lebih terlihat Pola yang dilakukan oleh Kepala Daerah *Incumbent* menjelang Pemilu dan Setelah Pemilu.

REFERENSI

- Amalia, Citra Rizki, and Suryo Pratolo. 2013. "Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektifitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 14 (1): 1–13.
- Aspinall, Edward, and Mada Sukmajati. 2015. "Patronase Dan Klientelisme Dalam Politik Elektoral Di Indonesia." In *Politik Uang Di Indonesia Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, 1–49.
- Budianto, and Stanly W Alexander. 2016. "Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara" 4 (4): 844–51.
- Caporaso, James A, and David P Levine. 2015. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. 2nded. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangna Kementrian Keuangan. 2018. Laporan Realisasi Anggaran 2014, 2015, 2016. Jakarta. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1999. *Law No 22/1999 on Local Government (Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah)*. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. <https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/95>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah, http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah/--376-490-PP58_2005.pdf.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, <http://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf?opwvc=1>.
- Julitawati, Ebit, Darwanis, and Jalaluddin. 2012. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.” *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 1 (1): 15–29.
- Kurniawan, Dhani. 2004. “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia,” 963–77. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=142378&val=5460&title=OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=142378&val=5460&title=OTONOMI%20DAERAH%20DAN%20DESENTRALISASI%20FISKAL%20DI%20INDONESIA).
- Komisi Pemilihan Umum. 2018. Laporan Pilkada 2015. Jakarta. <http://pilkada2015.kpu.go.id/>
- Lolombulan, Julius H. 2017. *Statistika Bagi Peneliti Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. 1sted. Penerbit ANDI.
- Martha, Diah. 2016. “Analisis Anggaran Belanja Daerah Sebelum Dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Pada Daerah Incumbent Di Indonesia.” Lampung.
- Menteri Dalam Negeri. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 (Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011)*. <http://manajemenrumahsakit.net/wp-content/uploads/2012/09/Permen-No.37-20101.pdf>.
- Prabowo, Erry Dwi. 2016. “Pengaruh Faktor Politik Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Hibah Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia TA 2015.” *Akuntansi Dan Bisnis* 16 (2): 97–107.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Republik Indonesia*

Nomor 127/PMK.02/2015 (Tentang Klasifikasi Anggaran)
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK%20127%20-%202015.pdf>

- Ritonga, Irwan Taufiq, and Mansur Iskandar Alam. 2010. "Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah." In *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, 1–25.
- Rumokoy, Nike K. 2016. "Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No. 9 Tahun 2015." *Jurnal Hukum Unsrat* 22 (6): 22–33.
- Rusmana, Oman, Dyah Setyaningrum, Yuliansyah, and Maryani. 2017. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. 1sted. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Statistik Nonparametrik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Supangat, Andi. 2017. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, Dan Nonparametrik*. 5thed. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Suranta, Sri, and Ristian Pangarso. 2015. "Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Hibah Sebelum Dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015." *Jurnal FEB Unsoed* 6 (1): 327–39.
- Syaiful. 2006. "Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan." <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>.
- Wertianti, I G A Gede, and A.A.N.B. Dwirandra. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD Dan DAU Sebagai Variabel Moderasi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 3: 567–84.
- Yuwani, Indrati Isti, and Sri Handayani. 2011. "Analisis Rasio Alokasi Belanja Antara Daerah Incumbent Dan Daerah Non Incumbent Sebelum Dan Pada Saat Pemilukada (Studi Kasus Di Indonesia)," no. 6: 1–25.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Nama Daerah yang *Incumbentnya* kembali menang

Belanja Hibah

No	Kabupaten//Kota	Belanja Hibah		
		2014	2015	2016
1	KAB. PELALAWAN	29,480,170,000	54,487,249,325	18,049,412,500
2	KAB. ROKAN HILIR	67,532,320,000	69,644,825,005	18,580,613,606
3	KAB. SIAK	183,064,225,668	150,166,649,875	25,409,720,766
4	KAB. AGAM	17,891,616,281	35,464,467,081	23,494,427,826
5	KAB. BANDUNG	100,173,730,800	169,528,017,394	86,120,723,750
6	KAB. BANGKA TENGAH	17,440,387,220	33,932,497,925	24,898,306,327
7	KAB. BANYUWANGI	72,860,137,523	122,750,256,472	60,034,851,251
8	KAB. BENGKAYANG	26,911,796,450	32,026,272,750	16,058,451,425
9	KAB. BLORA	83,473,909,536	101,656,770,660	31,053,916,647
10	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1,370,000,000	16,829,000,000	1,085,000,000
11	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	1,473,086,400	19,784,956,100	2,338,200,000
12	KAB. BONE BOLANGO	7,698,299,898	32,103,192,085	9,404,738,539
13	KAB BURU SELATAN	7,576,823,000	25,545,625,000	9,961,885,000
14	KAB. DOMPU	38,776,853,400	54,833,663,983	38,391,197,206
15	KAB FAK FAK	26,188,455,275	74,418,791,000	36,018,314,949
16	KAB. GUNUNG KIDUL	6,847,920,000	66,632,890,578	13,884,600,000
17	KAB. HALMAHERA TIMUR	3,668,162,218	2,326,471,950	6,577,500,000

No.	Kabupaten/Kota	Belanja Hibah		
		2014	2015	2016
18	KAB. INDRAGIRI HULU	47,260,500,000	77,459,346,136	500,000,000
19	KAB. JEMBRANA	28,530,546,108	47,663,603,117	24,558,905,554
20	KAB. KAIMANA	11,144,110,000	78,754,249,000	33,897,487,875
21	KAB. KAPUAS HULU	33,774,325,000	75,768,481,050	45,297,728,509
22	KAB KOTAWARINGIN TIMUR	67,258,157,641	91,949,427,504	46,358,976,822
23	KAB KUTAI KARTANEGARA	311,497,409,501	206,430,517,870	76,984,543,440
24	KAB LABUHAN BATU SELATAN	7,928,121,000	30,672,401,827	8,265,584,618
25	KAB. LABUHAN BATU UTARA	6,231,982,500	33,909,400,500	16,922,504,100
26	KAB LAMONGAN	105,066,336,691	238,961,050,464	162,208,019,801
27	KAB LEBONG	17,376,495,550	32,541,330,000	7,291,348,900
28	KAB MALANG	115,434,068,600	207,260,510,179	90,587,169,480
29	KAB MALINAU	207,430,229,797	90,856,464,012	74,941,479,492
30	KAB MALUKU BARAT DAYA	11,235,000,000	27,221,454,664	6,644,700,000
31	KAB MAMUJU UTARA	6,780,000,000	56,519,012,750	5,541,200,000
32	KAB MANDAILING NATAL	1,513,000,000	59,157,794,174	2,290,000,000
33	KAB MAGGARAI BARAT	3,721,903,600	24,628,790,000	6,006,677,588
34	KAB MAROS	24,222,134,502	57,047,147,873	13,755,903,200
35	KAB MINAHASA SELATAN	7,200,000,000	28,958,008,960	5,324,000,000
36	KAB MOJOKERTO	44,978,075,000	90,151,393,500	27,190,514,455
37	KAB NGAWI	72,983,630,450	100,571,749,589	49,453,446,192
38	KAB NIAS	6,886,257,000	26,583,000,000	7,869,600,000

No.	Kabupaten/Kota	Belanja Hibah		
		2014	2015	2016
39	KAB NIAS SELATAN	2,315,000,000	58,756,393,350	1,061,600,000
40	KAB OGAN KOMERING ULU	9,216,773,560	43,064,873,900	21,268,739,655
41	KAB PACITAN	25,308,799,701	38,213,105,970	24,282,642,656
42	KAB PADANG PARIAMAN	10,484,770,178	26,517,060,000	10,151,284,000
43	KAB POHUWATO	8,768,812,366	23,295,564,500	11,631,707,650
44	KAB PAK PAK BHARAT	1,561,800,000	15,993,785,100	4,197,212,100
45	KAB PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	51,756,690,191	55,024,049,300	30,141,003,600
46	KAB PEMALANG	73,092,995,400	111,268,805,501	47,030,617,043
47	KAB SELUMA	1,180,000,000	18,068,597,360	3,706,200,000
48	KAB SIDOARJO	72,551,570,150	151,649,747,780	132,100,932,100
49	KAB SIMALUNGUN	52,297,333,700	58,271,163,000	58,261,956,491
50	KAB SITUBONDO	19,254,915,000	40,743,020,800	21,802,863,000
51	KAB SLEMAN	40,979,605,718	50,913,755,411	61,314,688,740
52	KAB SOLOK SELATAN	8,575,067,411	14,652,500,000	7,395,837,000
53	KAB SUKOHARJO	16,338,570,521	63,821,498,650	30,310,745,000
54	KAB SUMENEP	116,662,694,907	116,290,056,573	40,157,930,800
55	KAB TABANAN	74,829,379,220	113,044,400,049	66,972,612,373
56	KAB TANAH BUMBU	45,033,176,781	73,317,478,619	43,911,496,040
57	KAB TAPANULI SELATAN	11,308,800,862	34,003,912,390	7,937,150,000
58	KAB TASIKMALAYA	141,725,000,000	270,152,692,000	192,973,250,000
59	KAB TOLITOLI	32,260,850,130	31,105,302,075	67,433,337,000

No	Kabupaten/Kota	Belanja Hibah		
		2014	2015	2016
60	KAB YALIMO	11,100,000,000	42,456,640,649	35,008,275,000
61	KOTA BALIKPAPAN	147,367,631,236	292,942,600,346	142,574,661,901
62	KOTA BANDAR LAMPUNG	23,348,257,500	62,306,707,000	29,436,203,850
63	KOTA BINJAI	14,559,018,331	29,486,780,000	10,291,782,000
64	KOTA BLITAR	12,054,951,233	75,221,600,350	15,471,036,250
65	KOTA CILEGON	32,892,257,725	71,102,490,600	47,425,942,240
66	KOTA MAGELANG	8,569,664,395	11,579,261,161	1,486,806,000
67	KOTA MANADO	18,643,242,500	61,278,300,000	32,044,576,597
68	KOTA MATARAM	17,975,572,877	31,434,939,230	24,164,891,400
69	KOTA SAMARINDA	159,146,356,890	173,704,986,100	31,691,725,000
70	KOTA SIBOLGA	5,660,297,000	16,746,071,500	5,867,000,000
71	KOTA SURABAYA	300,184,342,399	252,111,246,646	214,488,143,792
72	KOTA SURAKARTA	82,186,330,510	57,298,323,252	47,969,414,000
73	KOTA TERNATE	5,300,000,000	45,610,450,100	7,657,790,000
74	KOTA TOMOHON	357,500,000	14,800,000,000	3,267,502,098

Perubahan Positif (Naik) dan Negative (Turun) Belanja Hibah

No	Kabupaten//Kota	Belanja Hibah 2014-2015	Belanja Hibah 2015-2016
1	KAB. PELALAWAN	Naik	Turun
2	KAB. ROKAN HILIR	Naik	Turun
3	KAB. SIAK	Turun	Turun
4	KAB. AGAM	Naik	Turun
5	KAB. BANDUNG	Naik	Turun
6	KAB. BANGKA TENGAH	Naik	Turun
7	KAB. BANYUWANGI	Naik	Turun
8	KAB. BENGKAYANG	Naik	Turun
9	KAB. BLORA	Naik	Turun
10	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Naik	Turun
11	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	Naik	Turun
12	KAB. BONE BOLANGO	Naik	Turun
13	KAB BURU SELATAN	Naik	Turun
14	KAB. DOMPU	Naik	Turun
15	KAB FAK FAK	Naik	Turun
16	KAB. GUNUNG KIDUL	Naik	Turun
17	KAB. HALMAHERA TIMUR	Turun	Naik
18	KAB. INDRAGIRI HULU	Naik	Turun
19	KAB. JEMBRANA	Naik	Turun
20	KAB. KAIMANA	Naik	Turun
21	KAB. KAPUAS HULU	Naik	Turun
22	KAB KOTAWARINGIN TIMUR	Naik	Turun
23	KAB KUTAI KARTANEGARA	Turun	Turun
24	KAB LABUHAN BATU SELATAN	Naik	Turun
25	KAB. LABUHAN BATU UTARA	Naik	Turun
26	KAB LAMONGAN	Naik	Turun
27	KAB LEBONG	Naik	Turun
28	KAB MALANG	Naik	Turun
29	KAB MALINAU	Turun	Turun
30	KAB MALUKU BARAT DAYA	Naik	Turun
31	KAB MAMUJU UTARA	Naik	Turun
32	KAB MANDAILING NATAL	Naik	Turun
33	KAB MAGGARAI BARAT	Naik	Turun

34	KAB MAROS	Naik	Turun
35	KAB MINAHASA SELATAN	Naik	Turun
36	KAB MOJOKERTO	Naik	Turun
37	KAB NGAWI	Naik	Turun
38	KAB NIAS	Naik	Turun
39	KAB NIAS SELATAN	Naik	Turun
40	KAB OGAN KOMERING ULU	Naik	Turun
41	KAB PACITAN	Naik	Turun
42	KAB PADANG PARIAMAN	Naik	Turun
43	KAB POHUWATO	Naik	Turun
44	KAB PAK PAK BHARAT	Naik	Turun
45	KAB PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	Naik	Turun
46	KAB PEMALANG	Naik	Turun
47	KAB SELUMA	Naik	Turun
48	KAB SIDOARJO	Naik	Turun
49	KAB SIMALUNGUN	Naik	Turun
50	KAB SITUBONDO	Naik	Turun
51	KAB SLEMAN	Naik	Naik
52	KAB SOLOK SELATAN	Naik	Turun
53	KAB SUKOHARJO	Naik	Turun
54	KAB SUMENEP	Turun	Turun
55	KAB TABANAN	Naik	Turun
56	KAB TANAH BUMBU	Naik	Turun
57	KAB TAPANULI SELATAN	Naik	Turun
58	KAB TASIKMALAYA	Naik	Turun
59	KAB TOLITOLI	Turun	Naik
60	KAB YALIMO	Naik	Turun
61	KOTA BALIKPAPAN	Naik	Turun
62	KOTA BANDAR LAMPUNG	Naik	Turun
63	KOTA BINJAI	Naik	Turun
64	KOTA BLITAR	Naik	Turun
65	KOTA CILEGON	Naik	Turun
66	KOTA MAGELANG	Naik	Turun
67	KOTA MANADO	Naik	Turun
68	KOTA MATARAM	Naik	Turun
69	KOTA SAMARINDA	Naik	Turun
70	KOTA SIBOLGA	Naik	Turun

71	KOTA SURABAYA	Turun	Turun
72	KOTA SURAKARTA	Turun	Turun
73	KOTA TERNATE	Naik	Turun
74	KOTA TOMOHON	Naik	Turun

Belanja Bantuan Sosial yang Incumbent Kembali Menang

No	Kabupaten/Kota	Belanja Bantuan Sosial		
		2014	2015	2016
1	KAB. PELALAWAN	18,790,245,000	9,975,690,000	6,150,750,000
2	KAB. ROKAN HILIR	7,402,000,000	9,242,100,000	8,431,800,000
3	KAB. SIAK	10,364,900,000	19,553,732,000	14,042,480,000
4	KAB. AGAM	5,664,595,000	2,635,995,000	3,047,389,400
5	KAB. BANDUNG	9,951,500,000	14,098,500,000	809,750,000
6	KAB. BANGKA TENGAH	5,081,320,000	2,470,671,000	1,849,013,500
7	KAB. BANYUWANGI	10,026,215,000	6,131,490,319	8,063,209,736
8	KAB. BENGKAYANG	4,953,000,000	10,921,829,352	17,633,170,833
9	KAB. BLORA	3,962,500,000	6,637,900,000	2,238,542,655
10	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	5,428,000,000	1,985,100,000	2,347,660,000
11	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	3,797,000,000	280,000,000	350,000,000
12	KAB. BONE BOLANGO	10,531,246,800	8,147,886,075	10,012,337,000
13	KAB BURU SELATAN	8,225,485,000	4,167,457,612	3,685,350,000
14	KAB. DOMPU	10,342,950,000	2,213,637,223	362,957,000
15	KAB FAK FAK	17,651,304,900	19,086,235,132	14,329,750,000
16	KAB. JEMBRANA	7,771,031,500	5,458,814,000	4,661,376,700
17	KAB. KAIMANA	102,417,156,288	84,585,296,639	95,707,857,700
18	KAB. KAPUAS HULU	4,728,400,000	971,500,000	120,000,000
19	KAB KUTAI KARTANEGARA	55,843,480,700	31,571,123,000	3,971,200,000
20	KAB LABUHAN BATU SELATAN	1,899,092,800	430,000,000	390,000,000

No.	Kabupaten/Kota	Belanja Bantuan Sosial		
		2014	2015	2016
21	KAB. LABUHAN BATU UTARA	1,100,000,000	2,170,500,000	3,928,500,000
22	KAB LAMONGAN	11,496,508,240	12,724,137,377	33,702,488,504
23	KAB LEBONG	4,355,605,400	3,064,900,000	3,000,000,000
24	KAB LOMBOK TENGAH	5,263,119,350	1,607,414,750	1,912,582,251
25	KAB MALANG	15,115,149,000	20,105,658,000	12,476,650,000
26	KAB MALINAU	4,935,686,850	4,988,607,588	2,716,013,156
27	KAB MAMUJU UTARA	1,553,500,000	1,855,500,000	3,283,000,000
28	KAB MANDAILING NATAL	6,245,007,850	3,965,257,775	1,899,018,481
29	KAB MAGGARAI BARAT	5,388,280,667	887,633,819	697,500,000
30	KAB MOJOKERTO	1,702,250,000	5,660,300,000	6,459,760,000
31	KAB NGADA	16,088,665,000	19,979,381,000	13,859,438,565
32	KAB NGAWI	12,591,580,000	4,333,780,000	3,253,980,000
33	KAB NIAS	3,280,500,000	60,000,000	370,000,000
34	KAB NIAS SELATAN	8,872,417,330	2,577,500,000	618,100,000
35	KAB PACITAN	6,617,811,731	8,549,874,647	6,599,373,506
36	KAB PADANG PARIAMAN	2,052,050,000	635,945,000	814,465,000
37	KAB POHUWATO	51,731,267,130	5,939,487,000	21,042,427,600
38	KAB PAK PAK BHARAT	9,627,956,937	11,648,543,620	6,564,900,000
39	KAB PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	3,240,022,500	2,219,100,000	1,858,700,000
40	KAB PEMALANG	24,088,652,800	2,712,152,100	5,976,615,750
41	KAB SELUMA	4,249,436,560	2,200,904,200	28,000,000

No.	Kabupaten/kota	Belanja Bantuan Sosial		
		2014	2015	2016
42	KAB SIDOARJO	48,738,240,000	47,585,295,000	46,763,307,000
43	KAB SIMALUNGUN	7,637,140,500	4,578,136,200	811,200,000
44	KAB SITUBONDO	5,257,780,000	5,792,140,000	609,200,000
45	KAB SLEMAN	40,214,260,000	38,703,752,000	29,383,789,000
46	KAB SOLOK SELATAN	1,305,000,000	1,015,000,000	15,000,000
47	KAB SUKOHARJO	14,903,500,000	19,474,373,000	21,080,500,000
48	KAB SUMENEP	3,820,550,000	12,784,340,000	15,736,630,000
49	KAB TABANAN	7,938,000,000	3,204,500,000	4,938,334,500
50	KAB TANAH BUMBU	178,900,000	1,369,500,000	544,800,000
51	KAB TAPANULI SELATAN	16,331,233,461	15,261,770,902	1,635,468,000
52	KAB TASIKMALAYA	8,963,200,000	5,388,000,000	6,089,900,000
53	KAB TOLITOLI	3,005,403,000	1,707,500,000	460,000,000
54	KAB YALIMO	20,344,000,000	19,210,000,000	4,700,000,000
55	KOTA BALIKPAPAN	6,980,371,500	6,254,308,000	433,522,400
56	KOTA BANDAR LAMPUNG	9,312,387,707	12,517,800,000	2,545,000,000
57	KOTA BINJAI	2,375,383,783	7,134,270,000	1,227,700,000
58	KOTA BLITAR	19,044,680,574	675,480,000	23,723,011,500
59	KOTA CILEGON	19,482,623,675	17,665,912,000	12,975,088,000
60	KOTA MAGELANG	12,284,003,660	13,249,736,200	3,192,264,000
61	KOTA MANADO	46,596,000,000	29,117,500,000	11,125,000,000
62	KOTA MATARAM	34,211,988,233	42,735,059,800	15,774,617,500

No.	Kabupaten/Kota	Belanja Bantuan Sosial		
		2014	2015	2016
63	KOTA PEMATANG SIANTAR	1,084,750,000	613,000,000	1,019,387,500
64	KOTA SIBOLGA	3,877,492,500	7,468,623,250	9,251,162,200
65	KOTA SUNGAI PENUH	735,500,000	936,000,000	1,309,921,430
66	KOTA SURAKARTA	753,837,653	4,310,500,000	3,153,707,303
67	KOTA TERNATE	4,799,967,700	5,400,500,000	5,116,000,000
68	KOTA TOMOHON	785,775,000	785,000,000	700,000,000

Perubahan Positif (Naik) dan Negative (Turun) Belanja Bantuan Sosial

No	Kabupaten//Kota	Belanja Bantuan Sosial 2014-2015	Belanja Bantuan Sosial 2015-2016
1	KAB. PELALAWAN	Turun	Turun
2	KAB. ROKAN HILIR	Naik	Turun
3	KAB. SIAK	Naik	Turun
4	KAB. AGAM	Turun	Naik
5	KAB. BANDUNG	Naik	Turun
6	KAB. BANGKA TENGAH	Turun	Turun
7	KAB. BANYUWANGI	Turun	Naik
8	KAB. BENGKAYANG	Naik	Naik
9	KAB. BLORA	Naik	Turun
10	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Turun	Naik
11	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	Turun	Naik
12	KAB. BONE BOLANGO	Turun	Naik
13	KAB BURU SELATAN	Turun	Turun
14	KAB. DOMPU	Turun	Turun
15	KAB FAK FAK	Naik	Turun
16	KAB. JEMBRANA	Turun	Turun
17	KAB. KAIMANA	Turun	Naik
18	KAB. KAPUAS HULU	Turun	Turun
19	KAB KUTAI KARTANEGARA	Turun	Turun
20	KAB LABUHAN BATU SELATAN	Turun	Turun
21	KAB. LABUHAN BATU UTARA	Naik	Naik
22	KAB LAMONGAN	Naik	Naik
23	KAB LEBONG	Turun	Turun
24	KAB LOMBOK TENGAH	Turun	Naik
25	KAB MALANG	Naik	Turun
26	KAB MALINAU	Naik	Turun
27	KAB MAMUJU UTARA	Naik	Naik
28	KAB MANDAILING NATAL	Turun	Turun
29	KAB MAGGARAI BARAT	Turun	Turun
30	KAB MOJOKERTO	Naik	Naik
31	KAB NGADA	Naik	Turun

32	KAB NGAWI	Turun	Turun
33	KAB NIAS	Turun	Naik
34	KAB NIAS SELATAN	Turun	Turun
35	KAB PACITAN	Naik	Turun
36	KAB PADANG PARIAMAN	Turun	Naik
37	KAB POHUWATO	Turun	Naik
38	KAB PAK PAK BHARAT	Naik	Turun
39	KAB PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	Turun	Turun
40	KAB PEMALANG	Turun	Naik
41	KAB SELUMA	Turun	Turun
42	KAB SIDOARJO	Turun	Turun
43	KAB SIMALUNGUN	Turun	Turun
44	KAB SITUBONDO	Naik	Turun
45	KAB SLEMAN	Turun	Turun
46	KAB SOLOK SELATAN	Turun	Turun
47	KAB SUKOHARJO	Naik	Naik
48	KAB SUMENEP	Naik	Naik
49	KAB TABANAN	Turun	Naik
50	KAB TANAH BUMBU	Naik	Turun
51	KAB TAPANULI SELATAN	Turun	Turun
52	KAB TASIKMALAYA	Turun	Naik
53	KAB TOLITOLI	Turun	Turun
54	KAB YALIMO	Turun	Turun
55	KOTA BALIKPAPAN	Turun	Turun
56	KOTA BANDAR LAMPUNG	Naik	Turun
57	KOTA BINJAI	Naik	Turun
58	KOTA BLITAR	Turun	Naik
59	KOTA CILEGON	Turun	Turun
60	KOTA MAGELANG	Naik	Turun
61	KOTA MANADO	Turun	Turun
62	KOTA MATARAM	Naik	Turun
63	KOTA PEMATANG SIANTAR	Turun	Naik
64	KOTA SIBOLGA	Naik	Naik
65	KOTA SUNGAI PENUH	Naik	Naik
66	KOTA SURAKARTA	Naik	Turun
67	KOTA TERNATE	Naik	Turun
68	KOTA TOMOHON	Turun	Turun

Belanja Barang dan Jasa yang Incumbent Kembali Menang

No	Kabupaten//Kota	Belanja Barang dan Jasa		
		2014	2015	2016
1	KAB. PELALAWAN	385,480,839,831	520,296,631,584	466,362,846,263
2	KAB. ROKAN HILIR	469,477,722,311	570,958,676,052	385,596,090,782
3	KAB. SIAK	559,323,547,949	559,321,925,928	424,663,195,499
4	KAB. AGAM	181,997,115,541	216,427,454,628	206,987,655,393
5	KAB. BANDUNG	939,501,476,184	1,328,807,221,202	1,350,918,979,358
6	KAB. BANGKA TENGAH	134,577,205,603	158,145,899,063	181,449,322,815
7	KAB. BANYUWANGI	436,431,864,175	529,943,112,726	561,895,916,790
8	KAB. BENGKAYANG	150,941,192,792	210,048,308,012	198,653,331,457
9	KAB. BLORA	126,696,918,105	151,870,836,830	213,375,491,306
10	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	97,347,510,107	112,389,140,998	120,778,550,949
11	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	98,881,358,105	105,430,957,971	128,580,809,774
12	KAB. BONE BOLANGO	90,346,995,224	100,333,776,444	128,358,432,200
13	KAB BURU SELATAN	104,134,405,133	130,358,426,311	193,280,415,756
14	KAB. DOMPU	103,720,298,090	121,016,901,840	147,925,853,932
15	KAB FAK FAK	228,436,079,914	349,924,525,510	321,330,801,956
16	KAB. GUNUNG KIDUL	224,764,432,337	205,205,589,462	251,360,757,314
17	KAB. HALMAHERA TIMUR	160,604,604,988	202,477,593,703	156,833,464,669
18	KAB. INDRAGIRI HULU	422,146,727,478	283,715,328,668	410,687,696,551
19	KAB. IDRAMAYU	806,237,643,701	514,376,470,859	533,661,144,083
20	KAB. JEMBRANA	138,974,386,701	177,897,494,038	210,746,820,849

No	Kabupaten/Kota	Belanja Barang dan Jasa		
		2014	2015	2016
21	KAB. KAIMANA	207,011,297,459	182,022,852,598	201,798,223,093
22	KAB. KAPUAS HULU	274,169,219,990	354,050,877,764	388,710,020,623
23	KAB. KARO	120,843,054,243	204,362,886,968	389,761,849,687
24	KAB KOTAWARINGIN TIMUR	310,581,887,911	400,232,785,599	453,636,415,365
25	KAB KUTAI KARTANEGARA	1,181,212,017,432	1,350,222,979,028	989,443,655,186
26	KAB LABUHAN BATU SELATAN	120,313,798,770	128,502,827,971	156,165,360,782
27	KAB. LABUHAN BATU UTARA	145,730,636,873	151,372,465,425	208,508,961,867
28	KAB LAMONGAN	317,671,279,911	351,900,782,706	431,952,617,670
29	KAB LEBONG	100,995,273,514	103,171,507,267	120,667,188,250
30	KAB LOMBOK TENGAH	145,158,753,228	196,150,613,062	313,935,304,661
31	KAB MALANG	615,017,918,829	696,908,174,767	660,905,089,835
32	KAB MALINAU	382,288,019,976	353,211,888,887	385,017,516,718
33	KAB MALUKU BARAT DAYA	152,692,316,270	189,284,178,015	243,103,868,132
34	KAB MAMUJU UTARA	149,699,328,339	129,054,754,333	179,169,752,197
35	KAB MANDAILING NATAL	187,112,692,998	239,026,347,570	336,676,912,020
36	KAB MAGGARAI BARAT	94,926,794,542	144,546,879,929	226,726,603,241
37	KAB MAROS	159,905,796,295	178,456,909,316	208,790,027,125
38	KAB MINAHASA SELATAN	127,961,040,799	194,704,479,749	203,132,129,665
39	KAB MOJOKERTO	193,643,459,740	355,388,178,453	390,128,119,782
40	KAB NGADA	83,362,988,261	101,863,972,045	123,948,607,607
41	KAB NGAWI	241,601,991,235	263,313,243,894	331,087,349,965

No	Kabupaten/Kota	Belanja Barang dan Jasa		
		2014	2015	2016
42	KAB NIAS	119,186,091,205	147,399,583,647	154,900,210,197
43	KAB NIAS SELATAN	247,052,884,639	243,037,843,517	160,286,414,240
44	KAB OGAN KOMERING ULU	245,562,782,120	274,680,477,688	233,695,611,689
45	KAB PACITAN	161,434,465,274	206,319,624,360	261,429,303,999
46	KAB PADANG PARIAMAN	166,599,357,343	185,923,441,483	175,429,502,917
47	KAB POHUWATO	96,365,196,212	144,170,625,860	161,326,304,037
48	KAB PAK PAK BHARAT	99,247,219,315	110,239,698,660	128,997,443,173
49	KAB PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	134,778,122,829	153,661,800,554	209,932,761,163
50	KAB PEMALANG	277,126,956,583	328,610,279,346	410,135,051,496
51	KAB SELUMA	140,792,823,899	135,999,769,352	163,415,658,817
52	KAB SIDOARJO	690,868,186,165	803,323,462,155	821,320,659,096
53	KAB SIMALUNGUN	278,384,219,076	253,421,553,150	359,769,880,082
54	KAB SITUBONDO	234,704,576,636	248,269,958,970	287,133,702,026
55	KAB SLEMAN	351,490,651,032	439,453,872,166	543,498,494,698
56	KAB SOLOK SELATAN	108,915,573,986	153,791,596,670	196,017,636,650
57	KAB SUKOHARJO	174,624,735,414	199,259,788,323	259,971,924,851
58	KAB SUMBA TIMUR	141,850,382,455	166,173,447,042	227,936,399,115
59	KAB SUMENEP	239,267,478,309	287,172,293,105	370,177,191,111
60	KAB TABANAN	246,921,150,230	321,307,429,100	385,240,431,477
61	KAB TANAH BUMBU	289,745,156,326	386,265,428,492	428,836,264,464
62	KAB TAPANULI SELATAN	123,328,126,285	166,060,100,349	175,926,782,260

No	Kabupaten/Kota	Belanja Barang dan Jasa		
		2014	2015	2016
63	KAB TASIKMALAYA	217,060,968,240	293,447,129,175	431,346,864,143
64	KAB TIMOR TENGAH UTARA	92,036,065,298	149,576,919,357	187,340,483,549
65	KAB TOLITOLI	139,887,558,090	206,405,846,833	211,936,804,410
66	KAB YALIMO	251,179,909,784	290,887,237,668	306,102,076,013
67	KOTA BALIKPAPAN	461,928,499,689	794,398,873,851	696,574,344,802
68	KOTA BANDAR LAMPUNG	368,311,410,151	365,520,061,192	394,447,506,839
69	KOTA BINJAI	166,663,786,613	213,660,500,163	242,493,075,755
70	KOTA BLITAR	180,827,459,379	280,860,474,082	279,421,115,874
71	KOTA CILEGON	281,231,356,115	461,916,684,980	527,990,655,661
72	KOTA MAGELANG	211,643,391,964	234,278,141,430	258,948,360,119
73	KOTA MANADO	239,290,063,010	390,144,257,917	612,238,835,811
74	KOTA MATARAM	186,014,316,485	227,322,631,550	305,241,359,109
75	KOTA PEMATANG SIANTAR	116,688,417,465	128,672,712,598	146,190,678,581
76	KOTA SAMARINDA	504,938,020,140	813,270,571,725	584,913,260,322
77	KOTA SIBOLGA	138,815,386,889	155,210,552,453	177,753,748,714
78	KOTA SUNGAI PENUH	102,692,175,860	119,228,276,017	134,984,416,243
79	KOTA SURABAYA	1,814,062,371,710	2,125,973,133,026	2,586,690,389,712
80	KOTA SURAKARTA	276,844,848,456	360,313,939,466	422,475,910,668
81	KOTA TANGERANG SELATAN	601,077,705,839	678,880,851,512	801,613,778,865
82	KOTA TERNATE	133,808,505,425	208,510,954,114	256,153,659,470
83	KOTA TOMOHON	86,299,119,022	103,063,077,713	116,947,096,055

Perubahan Positif (Naik) dan Negative (Turun) Belanja Barang dan Jasa

No	Kabupaten/Kota	Belanja Barang dan Jasa 2014-2015	Belanja Barang dan Jasa 2015-2016
1	KAB. PELALAWAN	Naik	Turun
2	KAB. ROKAN HILIR	Naik	Turun
3	KAB. SIAK	Turun	Turun
4	KAB. AGAM	Naik	Turun
5	KAB. BANDUNG	Naik	Naik
6	KAB. BANGKA TENGAH	Naik	Naik
7	KAB. BANYUWANGI	Naik	Naik
8	KAB. BENGKAYANG	Naik	Turun
9	KAB. BLORA	Naik	Naik
10	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Naik	Naik
11	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	Naik	Naik
12	KAB. BONE BOLANGO	Naik	Naik
13	KAB BURU SELATAN	Naik	Naik
14	KAB. DOMPU	Naik	Naik
15	KAB FAK FAK	Naik	Turun
16	KAB. GUNUNG KIDUL	Turun	Naik
17	KAB. HALMAHERA TIMUR	Naik	Turun
18	KAB. INDRAGIRI HULU	Turun	Naik
19	KAB. IDRAMAYU	Turun	Naik
20	KAB. JEMBRANA	Naik	Naik
21	KAB. KAIMANA	Turun	Naik
22	KAB. KAPUAS HULU	Naik	Naik
23	KAB. KARO	Naik	Naik
24	KAB KOTAWARINGIN TIMUR	Naik	Naik
25	KAB KUTAI KARTANEGARA	Naik	Turun
26	KAB LABUHAN BATU SELATAN	Naik	Naik
27	KAB. LABUHAN BATU UTARA	Naik	Naik
28	KAB LAMONGAN	Naik	Naik
29	KAB LEBONG	Naik	Naik
30	KAB LOMBOK TENGAH	Naik	Naik
31	KAB MALANG	Naik	Turun
32	KAB MALINAU	Turun	Naik

33	KAB MALUKU BARAT DAYA	Naik	Naik
34	KAB MAMUJU UTARA	Turun	Naik
35	KAB MANDAILING NATAL	Naik	Naik
36	KAB MAGGARAI BARAT	Naik	Naik
37	KAB MAROS	Naik	Naik
38	KAB MINAHASA SELATAN	Naik	Naik
39	KAB MOJOKERTO	Naik	Naik
40	KAB NGADA	Naik	Naik
41	KAB NGAWI	Naik	Naik
42	KAB NIAS	Naik	Naik
43	KAB NIAS SELATAN	Turun	Turun
44	KAB OGAN KOMERING ULU	Naik	Turun
45	KAB PACITAN	Naik	Naik
46	KAB PADANG PARIAMAN	Naik	Turun
47	KAB POHUWATO	Naik	Naik
48	KAB PAK PAK BHARAT	Naik	Naik
49	KAB PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	Naik	Naik
50	KAB PEMALANG	Naik	Naik
51	KAB SELUMA	Turun	Naik
52	KAB SIDOARJO	Naik	Naik
53	KAB SIMALUNGUN	Turun	Naik
54	KAB SITUBONDO	Naik	Naik
55	KAB SLEMAN	Naik	Naik
56	KAB SOLOK SELATAN	Naik	Naik
57	KAB SUKOHARJO	Naik	Naik
58	KAB SUMBA TIMUR	Naik`	Naik
59	KAB SUMENEP	Naik	Naik
60	KAB TABANAN	Naik	Naik
61	KAB TANAH BUMBU	Naik	Naik
62	KAB TAPANULI SELATAN	Naik	Naik
63	KAB TASIKMALAYA	Naik	Naik
64	KAB TIMOR TENGAH UTARA	Naik	Naik
65	KAB TOLITOLI	Naik	Naik
66	KAB YALIMO	Naik	Naik
67	KOTA BALIKPAPAN	Naik	Turun
68	KOTA BANDAR LAMPUNG	Turun	Naik
69	KOTA BINJAI	Naik	Naik

70	KOTA BLITAR	Naik	Turun
71	KOTA CILEGON	Naik	Naik
72	KOTA MAGELANG	Naik	Naik
73	KOTA MANADO	Naik	Naik
74	KOTA MATARAM	Naik	Naik
75	KOTA PEMATANG SIANTAR	Naik	Naik
76	KOTA SAMARINDA	Naik	Turun
77	KOTA SIBOLGA	Naik	Naik
78	KOTA SUNGAI PENUH	Naik	Naik
79	KOTA SURABAYA	Naik	Naik
80	KOTA SURAKARTA	Naik	Naik
81	KOTA TANGERANG SELATAN	Naik	Naik
82	KOTA TERNATE	Naik	Naik
83	KOTA TOMOHON	Naik	Naik

Belanja Modal yang Incumbent Kembali Menang

No	Kabupaten//Kota	Belanja Modal		
		2014	2015	2016
1	KAB. PELALAWAN	327,477,591,172	453,584,905,313	454,684,129,007
2	KAB. ROKAN HILIR	561,189,705,456	465,846,934,162	399,644,132,462
3	KAB. SIAK	1,005,348,199,529	906,133,668,128	252,760,590,624
4	KAB. AGAM	153,139,990,029	161,073,310,924	192,852,825,224
5	KAB. BANDUNG	473,371,826,705	708,464,526,697	569,467,789,004
6	KAB. BANGKA TENGAH	164,353,582,283	239,570,001,533	226,574,815,983
7	KAB. BANYUWANGI	558,546,677,147	699,415,745,318	911,584,332,145
8	KAB. BENGKAYANG	276,021,935,178	270,882,406,223	339,242,966,408
9	KAB. BLORA	335,136,756,246	326,177,548,362	434,953,823,988
10	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	126,360,848,477	190,034,574,905	224,413,587,877
11	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	133,943,353,039	172,642,884,243	207,119,121,386
12	KAB. BONE BOLANGO	121,611,693,373	128,547,593,096	159,410,900,481
13	KAB BURU SELATAN	174,106,787,900	240,425,101,024	286,940,404,753
14	KAB. DOMPU	120,607,395,775	166,086,551,369	209,505,008,067
15	KAB FAK FAK	290,406,392,230	407,388,544,153	384,811,981,664
16	KAB. GUNUNG KIDUL	127,289,721,490	238,175,034,445	234,690,533,691
17	KAB. HALMAHERA TIMUR	240,371,910,569	189,129,694,269	260,051,283,138
18	KAB. INDRAGIRI HULU	557,609,596,418	279,249,015,680	246,977,757,399
19	KAB. IDRAMAYU	383,331,021,062	713,948,024,551	937,843,790,077
20	KAB. JEMBRANA	161,857,709,251	186,025,989,362	331,730,246,823

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal		
		2014	2015	2016
21	KAB. KAIMANA	275,967,038,451	327,870,339,422	274,365,315,105
22	KAB. KAPUAS HULU	374,954,741,635	369,611,501,830	516,742,090,512
23	KAB. KARO	155,665,020,656	300,098,182,224	231,098,360,315
24	KAB KOTAWARINGIN TIMUR	427,130,499,630	289,548,184,788	293,635,469,549
25	KAB KUTAI KARTANEGARA	2,582,404,431,252	2,820,501,942,494	598,722,429,709
26	KAB LABUHAN BATU SELATAN	244,955,647,450	262,030,817,625	294,626,135,833
27	KAB. LABUHAN BATU UTARA	213,674,388,745	217,437,966,471	256,257,019,320
28	KAB LAMONGAN	353,435,615,278	459,305,792,650	616,499,721,973
29	KAB LEBONG	157,791,496,957	195,412,930,062	257,755,928,522
30	KAB LOMBOK TENGAH	300,159,269,045	207,780,240,812	338,274,425,176
31	KAB MALANG	501,503,673,434	714,192,895,223	683,932,346,302
32	KAB MALINAU	862,540,411,342	483,310,582,124	327,401,134,684
33	KAB MALUKU BARAT DAYA	151,485,266,218	194,422,415,897	271,196,696,211
34	KAB MAMUJU UTARA	184,437,726,748	276,626,389,532	341,532,784,189
35	KAB MANDAILING NATAL	181,768,173,957	238,677,824,662	248,898,511,516
36	KAB MAGGARAI BARAT	198,883,921,545	196,133,991,919	249,657,382,292
37	KAB MAROS	297,822,399,349	325,693,298,837	422,440,251,452
38	KAB MINAHASA SELATAN	132,953,173,803	197,917,924,233	259,186,972,346
39	KAB MOJOKERTO	141,591,947,930	491,829,693,652	442,333,406,190
40	KAB NGADA	103,134,207,797	154,426,323,487	220,617,255,160
41	KAB NGAWI	243,988,354,559	313,226,242,409	355,374,670,586

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal		
		2014	2015	2016
42	KAB NIAS	158,098,310,646	194,330,739,832	227,559,502,344
43	KAB NIAS SELATAN	198,944,304,991	184,978,091,040	122,786,141,237
44	KAB OGAN KOMERING ULU	290,864,389,075	223,476,288,576	167,777,810,850
45	KAB PACITAN	200,429,181,165	268,151,647,437	379,166,997,217
46	KAB PADANG PARIAMAN	157,967,854,426	210,056,212,093	306,496,631,371
47	KAB POHUWATO	125,319,945,577	177,287,115,029	190,126,603,640
48	KAB PAK PAK BHARAT	144,433,402,509	156,407,389,643	164,178,919,569
49	KAB PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	305,729,437,914	404,953,048,450	490,626,623,021
50	KAB PEMALANG	164,388,705,445	267,766,979,163	246,080,497,261
51	KAB SELUMA	213,413,375,249	165,116,422,621	206,470,008,526
52	KAB SIDOARJO	691,163,487,699	936,192,614,541	809,997,501,058
53	KAB SIMALUNGUN	226,370,774,680	185,676,905,078	210,953,244,334
54	KAB SITUBONDO	325,053,037,623	340,683,173,357	416,863,544,279
55	KAB SLEMAN	282,862,049,259	426,782,827,409	344,002,326,231
56	KAB SOLOK SELATAN	183,842,571,975	215,458,902,302	234,219,029,497
57	KAB SUKOHARJO	197,957,953,910	265,948,514,720	327,611,459,445
58	KAB SUMBA TIMUR	176,635,601,066	233,615,810,630	286,524,913,396
59	KAB SUMENEP	277,785,358,231	370,141,331,155	272,014,575,159
60	KAB TABANAN	136,344,862,471	112,969,442,759	257,059,674,205
61	KAB TANAH BUMBU	501,029,417,895	303,453,096,460	272,927,192,474
62	KAB TAPANULI SELATAN	222,350,225,386	303,915,012,639	307,152,296,664

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal		
		2014	2015	2016
63	KAB TASIKMALAYA	558,496,505,928	462,706,221,343	737,110,283,652
64	KAB TIMOR TENGAH UTARA	107,974,475,236	156,625,527,928	181,729,950,456
65	KAB TOLITOLI	164,174,579,164	143,785,207,705	153,772,235,992
66	KAB YALIMO	351,680,917,250	401,607,737,816	408,769,881,730
67	KOTA BALIKPAPAN	1,032,806,387,802	1,090,412,502,613	564,259,837,372
68	KOTA BANDAR LAMPUNG	354,190,528,148	245,171,296,284	199,207,452,555
69	KOTA BINJAI	153,284,846,162	174,972,076,727	202,943,191,598
70	KOTA BLITAR	126,326,327,563	508,331,950,780	692,718,770,257
71	KOTA CILEGON	317,544,837,119	373,027,108,025	461,651,193,903
72	KOTA MAGELANG	319,022,187,365	253,851,809,152	221,924,457,916
73	KOTA MANADO	208,880,230,185	277,789,614,727	399,836,332,915
74	KOTA MATARAM	231,832,379,737	275,387,276,321	333,436,990,115
75	KOTA PEMATANG SIANTAR	112,533,368,893	152,228,322,901	199,557,080,622
76	KOTA SAMARINDA	1,322,656,294,646	1,209,608,304,449	695,737,176,719
77	KOTA SIBOLGA	105,880,982,815	126,724,781,839	185,382,143,913
78	KOTA SUNGAI PENUH	158,048,421,588	177,939,732,342	212,004,597,663
79	KOTA SURABAYA	1,404,366,425,421	1,785,125,255,500	1,789,394,044,827
80	KOTA SURAKARTA	286,491,756,994	235,829,590,702	307,534,354,570
81	KOTA TANGERANG SELATAN	4,750,206,918,181	982,985,799,542	1,049,322,168,298
82	KOTA TERNATE	149,178,430,887	150,235,317,734	175,138,711,262
83	KOTA TOMOHON	146,198,253,417	129,824,391,601	156,670,785,831

Perubahan Positif (Naik) dan Negative (Turun) Belanja Modal

No	Kabupaten//Kota	Belanja Modal 2014-2015	Belanja Modal 2015-2016
1	KAB. PELALAWAN	Naik	Naik
2	KAB. ROKAN HILIR	Turun	Turun
3	KAB. SIAK	Turun	Turun
4	KAB. AGAM	Naik	Naik
5	KAB. BANDUNG	Naik	Turun
6	KAB. BANGKA TENGAH	Naik	Turun
7	KAB. BANYUWANGI	Naik	Naik
8	KAB. BENGKAYANG	Turun	Naik
9	KAB. BLORA	Turun	Naik
10	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	Naik	Naik
11	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	Naik	Naik
12	KAB. BONE BOLANGO	Naik	Naik
13	KAB BURU SELATAN	Naik	Naik
14	KAB. DOMPU	Naik	Naik
15	KAB FAK FAK	Naik	Turun
16	KAB. GUNUNG KIDUL	Naik	Turun
17	KAB. HALMAHERA TIMUR	Turun	Naik
18	KAB. INDRAGIRI HULU	Turun	Turun
19	KAB. IDRAMAYU	Naik	Naik
20	KAB. JEMBRANA	Naik	Naik
21	KAB. KAIMANA	Naik	Turun
22	KAB. KAPUAS HULU	Turun	Naik
23	KAB. KARO	Naik	Turun
24	KAB KOTAWARINGIN TIMUR	Turun	Naik
25	KAB KUTAI KARTANEGARA	Naik	Turun
26	KAB LABUHAN BATU SELATAN	Naik	Naik
27	KAB. LABUHAN BATU UTARA	Naik	Naik
28	KAB LAMONGAN	Naik	Naik
29	KAB LEBONG	Naik	Naik
30	KAB LOMBOK TENGAH	Turun	Naik
31	KAB MALANG	Naik	Turun
32	KAB MALINAU	Turun	Turun
33	KAB MALUKU BARAT DAYA	Naik	Naik
34	KAB MAMUJU UTARA	Naik	Naik

35	KAB MANDAILING NATAL	Naik	Naik
36	KAB MAGGARAI BARAT	Turun	Naik
37	KAB MAROS	Naik	Naik
38	KAB MINAHASA SELATAN	Naik	Naik
39	KAB MOJOKERTO	Naik	Turun
40	KAB NGADA	Naik	Naik
41	KAB NGAWI	Naik	Naik
42	KAB NIAS	Naik	Naik
43	KAB NIAS SELATAN	Turun	Turun
44	KAB OGAN KOMERING ULU	Turun	Turun
45	KAB PACITAN	Naik	Naik
46	KAB PADANG PARIAMAN	Naik	Naik
47	KAB POHUWATO	Naik	Naik
48	KAB PAK PAK BHARAT	Naik	Naik
49	KAB PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	Naik	Naik
50	KAB PEMALANG	Naik	Turun
51	KAB SELUMA	Turun	Naik
52	KAB SIDOARJO	Naik	Turun
53	KAB SIMALUNGUN	Turun	Naik
54	KAB SITUBONDO	Naik	Naik
55	KAB SLEMAN	Naik	Turun
56	KAB SOLOK SELATAN	Naik	Naik
57	KAB SUKOHARJO	Naik	Naik
58	KAB SUMBA TIMUR	Naik	Naik
59	KAB SUMENEP	Naik	Turun
60	KAB TABANAN	Turun	Naik
61	KAB TANAH BUMBU	Turun	Turun
62	KAB TAPANULI SELATAN	Naik	Naik
63	KAB TASIKMALAYA	Turun	Naik
64	KAB TIMOR TENGAH UTARA	Naik	Naik
65	KAB TOLITOLI	Turun	Naik
66	KAB YALIMO	Naik	Naik
67	KOTA BALIKPAPAN	Naik	Turun
68	KOTA BANDAR LAMPUNG	Turun	Turun
69	KOTA BINJAI	Naik	Naik
70	KOTA BLITAR	Naik	Naik
71	KOTA CILEGON	Naik	Naik
72	KOTA MAGELANG	Turun	Turun

73	KOTA MANADO	Naik	Naik
74	KOTA MATARAM	Naik	Naik
75	KOTA PEMATANG SIANTAR	Naik	Naik
76	KOTA SAMARINDA	Turun	Turun
77	KOTA SIBOLGA	Naik	Naik
78	KOTA SUNGAI PENUH	Naik	Naik
79	KOTA SURABAYA	Naik	Naik
80	KOTA SURAKARTA	Turun	Naik
81	KOTA TANGERANG SELATAN	Turun	Naik
82	KOTA TERNATE	Naik	Naik
83	KOTA TOMOHON	Turun	Naik

Lampiran 2 : Hasil Normalitas Data

Belanja Hibah

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Belanja Hibah 2014	.230	74	.000	.699	74	.000
Belanja Hibah 2015	.206	74	.000	.792	74	.000
Belanja Hibah 2016	.204	74	.000	.723	74	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Belanja Bantuan Sosial

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Belanja Bantuan Sosial 2014	.251	68	.000	.630	68	.000
Belanja Bantuan Sosial 2015	.233	68	.000	.658	68	.000
Belanja Bantuan Sosial 2016	.279	68	.000	.547	68	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Belanja Barang dan Jasa

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Belanja Barang dan Jasa 2014	.240	83	.000	.624	83	.000
Belanja Barang dan Jasa 2015	.236	83	.000	.624	83	.000
Belanja Barang dan Jasa 2016	.233	83	.000	.580	83	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Belanja Modal

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Belanja Modal 2014	.320	83	.000	.408	83	.000
Belanja Modal 2015	.246	83	.000	.566	83	.000
Belanja Modal 2016	.209	83	.000	.706	83	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 3 = Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Belanja Hibah 2014-2015

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Hibah 2015 - Belanja Hibah 2014	8 ^a	36.38	291.00
Negative Ranks			
Positive Ranks	66 ^b	37.64	2484.00
Ties	0 ^c		
Total	74		

- a. Belanja Hibah 2015 < Belanja Hibah 2014
- b. Belanja Hibah 2015 > Belanja Hibah 2014
- c. Belanja Hibah 2015 = Belanja Hibah 2014

Test Statistics^a

	Belanja Hibah 2015 - Belanja Hibah 2014
Z	-5.907 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on negative ranks.

Belanj Hibah 2015-2016

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Hibah 2016 - Belanja Hibah 2015	71 ^a	38.30	2719.00
Negative Ranks			
Positive Ranks	3 ^b	18.67	56.00
Ties	0 ^c		
Total	74		

- a. Belanja Hibah 2016 < Belanja Hibah 2015
- b. Belanja Hibah 2016 > Belanja Hibah 2015
- c. Belanja Hibah 2016 = Belanja Hibah 2015

Test Statistics^a

	Belanja Hibah 2016 - Belanja Hibah 2015
Z	-7.173 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on positive ranks.

Belanja Bantuan Sosial 2014-2015

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Bantuan Sosial 2015 - Belanja Bantuan Sosial 2014			
Negative Ranks	41 ^a	36.07	1479.00
Positive Ranks	27 ^b	32.11	867.00
Ties	0 ^c		
Total	68		

- a. Belanja Bantuan Sosial 2015 < Belanja Bantuan Sosial 2014
- b. Belanja Bantuan Sosial 2015 > Belanja Bantuan Sosial 2014
- c. Belanja Bantuan Sosial 2015 = Belanja Bantuan Sosial 2014

Test Statistics^a

	Belanja Bantuan Sosial 2015 - Belanja Bantuan Sosial 2014
Z	-1.870 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.062

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on positive ranks.

Belanja Bantuan Sosial 2015-2016

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Bantuan Sosial 2016 - Belanja Bantuan Sosial 2015			
Negative Ranks	44 ^a	36.95	1626.00
Positive Ranks	24 ^b	30.00	720.00
Ties	0 ^c		
Total	68		

- a. Belanja Bantuan Sosial 2016 < Belanja Bantuan Sosial 2015
- b. Belanja Bantuan Sosial 2016 > Belanja Bantuan Sosial 2015
- c. Belanja Bantuan Sosial 2016 = Belanja Bantuan Sosial 2015

Test Statistics^a

	Belanja Bantuan Sosial 2016 - Belanja Bantuan Sosial 2015
Z	-2.768 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.006

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on positive ranks.

Belanja Barang dan Jasa 2014-2015

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Barang dan Jasa 2015 - Belanja Barang dan Jasa 2014	Negative Ranks	11 ^a	27.64	304.00
	Positive Ranks	72 ^b	44.19	3182.00
	Ties	0 ^c		
	Total	83		

- a. Belanja Barang dan Jasa 2015 < Belanja Barang dan Jasa 2014
- b. Belanja Barang dan Jasa 2015 > Belanja Barang dan Jasa 2014
- c. Belanja Barang dan Jasa 2015 = Belanja Barang dan Jasa 2014

Test Statistics^a

	Belanja Barang dan Jasa 2015 - Belanja Barang dan Jasa 2014
Z	-6.533 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on negative ranks.

Belanja Barang dan Jasa 2015-2016

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Barang dan Jasa 2016 - Belanja Barang dan Jasa 2015	Negative Ranks	15 ^a	45.67	685.00
	Positive Ranks	68 ^b	41.19	2801.00
	Ties	0 ^c		
	Total	83		

- a. Belanja Barang dan Jasa 2016 < Belanja Barang dan Jasa 2015
- b. Belanja Barang dan Jasa 2016 > Belanja Barang dan Jasa 2015
- c. Belanja Barang dan Jasa 2016 = Belanja Barang dan Jasa 2015

Test Statistics^a

	Belanja Barang dan Jasa 2016 - Belanja Barang dan Jasa 2015
Z	-4.803 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on negative ranks.

Belanja Modal 2014-2015

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Modal 2015 - Belanja Modal 2014	Negative Ranks	25 ^a	41.08	1027.00
	Positive Ranks	58 ^b	42.40	2459.00
	Ties	0 ^c		
	Total	83		

- a. Belanja Modal 2015 < Belanja Modal 2014
- b. Belanja Modal 2015 > Belanja Modal 2014
- c. Belanja Modal 2015 = Belanja Modal 2014

Test Statistics^a

	Belanja Modal 2015 - Belanja Modal 2014
Z	-3.251 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on negative ranks.

Belanja Modal 2015-2016

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Belanja Modal 2016 - Belanja Modal 2015	Negative Ranks	24 ^a	45.79	1099.00
	Positive Ranks	59 ^b	40.46	2387.00
	Ties	0 ^c		
	Total	83		

- a. Belanja Modal 2016 < Belanja Modal 2015
- b. Belanja Modal 2016 > Belanja Modal 2015
- c. Belanja Modal 2016 = Belanja Modal 2015

Test Statistics^a

	Belanja Modal 2016 - Belanja Modal 2015
Z	-2.924 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.003

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on negative ranks.